



PETUNJUK TEKNIS  
**IMPLEMENTASI GDAD**  
DI PROVINSI ACEH

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ALTERNATIF  
DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI  
TAHUN 2019

## **TIM PENYUSUN:**

- Penanggung Jawab : Irjen Pol Drs. Dunan Ismail Isja, MM.  
*Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN*
- Ketua Pelaksana : Brigjen Pol Drs. Andjar Dewanto, SH, MBA  
*Direktur Pemberdayaan Alternatif*
- Wakil : Hendrajid Putut Widagdo, S.Sos, MM, MSi  
*Kasubdit Masyarakat Desa*
- Sekretaris : Yudhi Widiarto, SP  
*Kasi Pemetaan dan Analisis Subdit Desa*
- Anggota : - Nyoman Mertajaya  
- Andarsari Pradani, SSi.  
- Khrisna Anggara, SH, MSi  
- Ir. Nuzuli Kartika Rukmi  
- Darmanto, SE  
- Hendi, SH  
- Nana Febriansyah

## KATA PENGANTAR

**D**engan Dengan mengharap Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kami dapat menerbitkan buku ***Petunjuk Teknis Implementasi GDAD di Provinsi Aceh*** pada Satuan Kerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan narkotika nasional ini. Diharapkan dengan terbitnya buku ini dapat menambah pemahaman pembaca tentang pentingnya implementasi GDAD dalam mempercepat pembangunan Aceh dan mengentaskan masalah Narkoba melalui solusi dan pendekatan kesejahteraan.

Dengan terbitnya buku ini diharapkan implementasi GDAD semakin dipahami K/L, Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Kabupaten dan dunia usaha sehingga fokus program dan anggaran yang telah disusun dapat dialokasikan di 3 lokasi *Pilot Project*, yaitu: Kabupaten Aceh Besar, Bireuen dan Gayo Lues, khususnya program yang sesuai dengan implementasi Inpres no 6/2018.

Akhirnya, kami berharap agar buku petunjuk teknis ini dapat memicu dan memacu kerja dan kinerja seluruh stakeholder menuju terciptanya lingkungan dan kawasan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Atas prestasi ini kami mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih kepada semua pihak.

Jakarta, Desember 2019  
Tim Penyusun.

## SAMBUTAN DEPUTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BNN RI

Saya mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan berterima kasih kepada semua pihak dengan terbitnya Buku ***Petunjuk Teknis Implementasi GDAD di Provinsi Aceh*** yang diharapkan menjadi pedoman untuk membantu kegiatan program *Alternative Development*. GDAD adalah *Grand Design of Alternative Development* (2016-2025) yaitu program berkelanjutan selama 2016-2025 untuk mengentaskan masalah Ganja dan Narkoba di provinsi Aceh melalui program pemberdayaan alternatif (*Alternative Development/AD*).

Implementasi GDAD telah menjadi agenda dalam percepatan pembangunan di Aceh yang dilakukan pemerintah yang melibatkan semua Kementerian dan Lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan dunia usaha. Secara eksplisit implementasi ini adalah amanah Instruksi Presiden RI nomor 6 tahun 2018 tentang RAN P4GN 2018-2019 tentang pengembangan potensi masyarakat di kawasan rawan dan rentan Narkoba oleh K/L pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan Dunia usaha.

Oleh karenanya, buku ini menjadi panduan bagi K/L pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan Dunia usaha untuk ikut mendukung program AD yang menysasar 6 tahapan, yaitu: pengembangan sosial dan budaya, peningkatan keamanan dan ketertiban; pelestarian lingkungan dan hutan; peningkatan ketahanan pangan, pengembangan ekonomi; pengembangan agrowisata dan agropolitan. Diharapkan dengan hadirnya K/L pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan Dunia usaha dalam program ini percepatan pembangunan di Aceh dapat dipacu lebih cepat sekaligus mengurangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Sebagaimana diketahui, pemilihan provinsi Aceh sebagai sasaran GDAD karena Aceh masih menjadi produsen Narkoba (Ganja), masih marak terjadi *clandestine laboratory* Shabu, pintu masuk (*entry point*) Narkoba dari dan menuju Aceh, marak peredaran gelap Narkoba, banyak bandar Narkoba yang ditahan di Lapas/Tahanan, banyak kurir Narkoba dari Aceh yang ditangkap di dalam/luar negeri, banyak bandar Narkoba yang diputus mati oleh pengadilan dan banyak kawasan rawan Narkoba. Singkat kata, Aceh seperti miniatur masalah Narkoba untuk Indonesia.

Oleh karenanya pendekatan P4GN bagi Aceh menjadi prioritas pembangunan yang sangat penting bagi penyelamatan generasi muda khususnya di Aceh, sebagaimana tujuan pembangunan Nasional yaitu peningkatan Pembangunan sumber daya manusia unggul dan maju, 2020-2024.

Pedoman ini disusun dengan memperhatikan petunjuk teknis bagaimana mengimplementasikan 6 tahapan di atas ke dalam kerangka kerja yang sinergis, dengan alokasi anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan dunia usaha.

Semoga buku ini bermanfaat dan memudahkan bagi para pembaca untuk lebih menghayati pentingnya membina kawasan rawan Narkoba sebagai solusi menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN



**Drs. Dunan Ismail Isja, MM**

## Daftar Isi

Tim Penyusun .....	2
Kata Pengantar .....	3
Sambutan Deputi Pemberdayaan Masyarakat .....	4
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>9</b>
A. Latar Belakang .....	9
B. Dasar Hukum .....	13
C. Maksud dan Tujuan .....	14
D. Ruang Lingkup .....	14
E. Pengertian .....	14
F. Sistematika .....	16
<b>BAB II PROGRAM ALTERNATIVE DEVELOPMENT DAN GRAND DESIGN OF ALTERNATIVE DEVELOPMENT 2016-2025 .....</b>	<b>17</b>
A. Mengenal Program Alternative Development (AD) .....	17
B. Mengenal Grand Design of Alternative Development (GDAD) 2016-2025 di Provinsi Aceh .....	21
C. Mengenal 3 Pilot Project GDAD (Aceh Besar, Bireuen dan Gayo Lues) .....	23
<b>BAB III TEKNIS IMPLEMENTASI GDAD .....</b>	<b>27</b>
A. Pemetaan Potensi Wilayah (Analisis SWOT) .....	29
B. Mekanisme Pemetaan Potensi Kawasan dan Masyarakat .....	28
C. Target sasaran Pemetaan Potensi Kawasan dan Masyarakat .....	29
D. Target Keluaran dan Hasil Pemetaan Potensi .....	29
E. Pengembangan Kapasitas Kewirausahaan .....	30
F. Pengukuran Keberhasilan Program .....	30
<b>BAB IV CAPAIAN TRUST BUILDING GDAD (2016-2018) .....</b>	<b>33</b>
A. Capaian Kerja Trust Building oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Akademisi .....	33
B. Capaian Kinerja Trust Building yang Dirasakan Masyarakat Aceh Besar, Bireuen dan Gayo Lues .....	39

<b>BAB V CAPAIAN IMPLEMENTASI GDAD TAHUN 2019 .....</b>	<b>45</b>
A. Implementasi dalam Pengembangan Sosial dan Budaya .....	45
B. Implementasi dalam Peningkatan Keamanan dan Ketertiban .....	49
C. Implementasi dalam Pelestarian lingkungan hidup dan Hutan .....	50
D. Implementasi dalam Pengembangan Ekonomi .....	52
E. Implementasi dalam Peningkatan Ketahanan Pangan .....	56
F. Implementasi dalam Pengembangan Agrowisata .....	58
<b>BAB VI RENCANA TINDAK LANJUT GDAD 2020-2025 .....</b>	<b>61</b>
A. Mempromosikan Hidup Sehat anti Narkoba .....	61
B. Meningkatkan Sinergi dengan Instansi Pemerintah .....	61
C. Meningkatkan Kemitraan dengan Dunia Usaha .....	62
D. Meningkatkan peran serta Akademisi dan Praktisi .....	63
E. Meningkatkan Pelibatan organisasi masyarakat .....	63
F. Meningkatkan kerjasama bilateral dan multilateral .....	64
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
Lampiran 01 .....	69

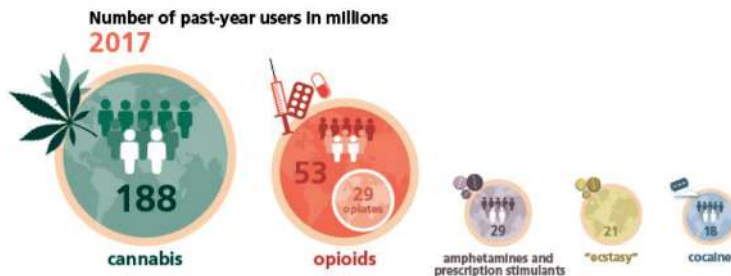




# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Permasalahan Narkoba di seluruh dunia tahun 2019 masih menjadi perhatian serius dari berbagai negara. Hal tersebut tergambarkan dalam laporan *World Drug Report* (WDR) 2019 yang menggambarkan kondisi penyalahgunaan Narkoba dunia tahun 2017, bahwa kondisi penyalahgunaan Narkoba di Dunia diperkirakan 271 juta orang atau 5,5% dari populasi global berusia 15-64 tahun, dengan dominasi jenis Narkoba yang disalahgunakan Ganja 61% (188 juta) dari total penyalahgunaan Narkoba usia 15-69 tahun. Prevalensi penggunaan Ganja tetap stabil secara luas di tingkat global selama satu dekade, bahkan dengan tren yang meningkat di Amerika dan Asia.



Infografik jumlah penyalahguna Narkoba di Dunia  
(Sumber World Drugs Report 2019)

Dalam menanggulangi masalah Narkotika, masyarakat internasional telah memiliki tiga Konvensi anti Narkoba yaitu *Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*; *Convention on Psychotropic Substances, 1971*; dan *Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988*. Sebagai negara pihak di ketiga konvensi PBB terkait narkotika, Indonesia aktif dalam kerja sama internasional di bidang penanggulangan tindak pidana perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang.



*Kepala BNN menjadi pembicara pada Sidang ke-43 CND di Markas UNODC, di Vienna, Austria*

Pada tingkat multilateral, Indonesia terus berupaya memainkan peran aktifnya dalam memberantas peredaran dan perdagangan gelap Narkoba dalam berbagai forum seperti *Commission on Narcotic Drugs, Special Session of the United Nations General Assembly on the World Drug Problem* yang akan diadakan pada 19-21 April 2016, *Head of National Drug Law Enforcement for Asia-Pacific* dan berbagai pertemuan lainnya di bawah kerangka UNODC.

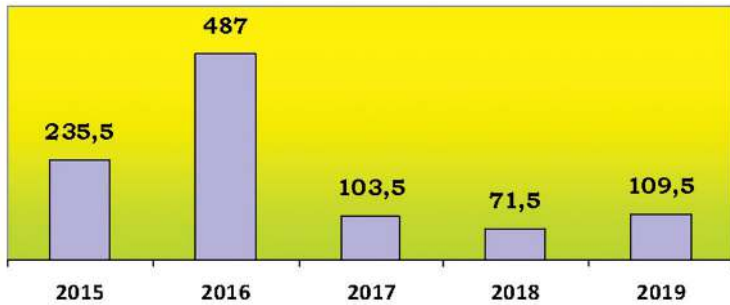
Berdasarkan *Grand Design BNN 2018-2045*, Indonesia akan terus mendukung setiap upaya penguatan peran lembaga-lembaga PBB, peningkatan koordinasi antar para pemangku kepentingan pada tingkat internasional dan regional, dalam upaya menanggulangi masalah narkotika secara terpadu dan komprehensif, termasuk melalui pendekatan *alternative development* melalui langkah-langkah pembangunan dan peningkatan penghasilan di masyarakat

Kondisi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. menurut hasil Survey Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di 34 Provinsi di Indonesia oleh BNN dan LIPI (2019), diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sebesar 1,80% atau  $\pm 3.419.188$  orang, atau 180 dari 10.000 penduduk Indonesia usia 15-69 tahun terpapar Narkoba dalam setahun terakhir.

Dari survey di atas juga diketahui, terdapat 5 (lima) jenis Narkoba yang paling banyak disalahgunakan, yaitu: Ganja (65,2%), benzodiazepin (35,5%), Shabu (28,4%), ekstasi (16,4%) dan Dextro

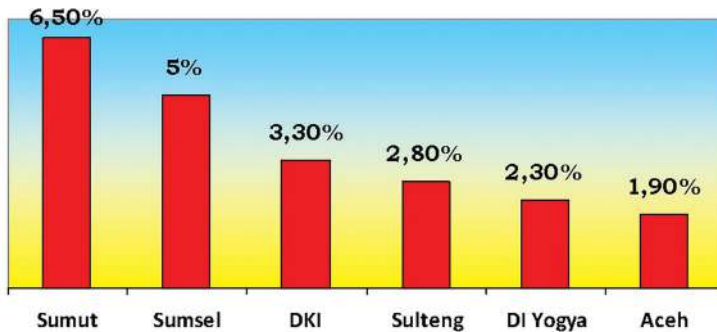
(7%). Umur pertama pakai Narkoba, jika di perdesaan berusia 10 tahun dan jika di perkotaan berusia 7 tahun.

Dominasi penyalahgunaan Ganja di Indonesia, telah berlangsung selama 15 tahun, sejak dilakukan survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia tahun 2004-2019. Akar masalah penyalahgunaan Ganja bersumber dari kultivasi Ganja yang ada di pulau Sumatera khususnya provinsi Aceh. Menurut data hasil operasi eradikasi Ganja oleh BNN dan Polda Aceh selama periode 2015-2019 tergambar dalam grafik berikut :



Luasan (Hektar) lahan kultivasi Ganja yang disita tahun 2015-2019 di Aceh (sumber Polda Aceh)

Berdasarkan data dan fakta bahwa sumber tanaman Ganja berada di provinsi Aceh, terus diungkap BNN, TNI dan Polda Aceh sepanjang tahun. Oleh karenanya provinsi Aceh termasuk provinsi terbesar ke-6 dalam angka prevalensi penyalahguna Narkoba, dengan angka prevalensi sebesar 1,9% atau diestimasikan jumlah penyalahguna Narkoba sebesar 52.190 orang. Berikut 6 provinsi terbesar dalam jumlah penyalahguna Narkoba di Indonesia hasil Survey BNN dan LIPI (2019).



Data 6 Provinsi dengan angka prevalensi penyalahguna Narkoba terbesar di Indonesia

Berdasarkan grafik 02 di atas, dapat dianalisis bahwa Aceh menjadi sumber Narkoba bagi Sumatera Utara dan juga sasaran pasar Narkoba dari Sumatera Utara. Fakta itu didukung adanya kultivasi Ganja terbesar di Indonesia yang berada di pegunungan Tor Sihite, Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Bahkan di lereng Taman Nasional Gunung Leuser yang 70% ada di Kabupaten Gayo Lues, juga menjadi basis kultivasi Ganja.

Fakta kerawanan kawasan rawan Narkoba di Aceh juga ditunjukkan dengan banyaknya entry point Narkoba sebanyak 29 titik, kawasan rawan Narkoba 84 lokasi, ditemukannya *clandestine laboratory* jenis Shabu, pengungkapan penyelundupan Shabu berpuluh puluh kilogram, banyaknya warga binaan di Lapas dengan kasus Narkoba hingga 60%, banyaknya kasus yang melibatkan wanita sebagai kurir Narkoba dan banyaknya tangkapan kurir Narkoba warga Aceh oleh negara Malaysia. Bahkan tahun 2019, pengadilan Tinggi Aceh menjatuhkan 8 terdakwa kasus pidana Narkoba dengan hukuman mati.

Dari fakta dan data demografi Bappeda Aceh (2019), provinsi Aceh juga mengalami masalah sosial yang harus mendapatkan perhatian dalam percepatan pembangunan, seperti: angka kemiskinan 15,32% (termiskin ke-6 se-Indonesia dan ke-1 se-Sumatera), pengangguran 6,36% (tertinggi ke-2 se-Sumatera), Rendahnya pertumbuhan ekonomi hanya 4,61% (terendah ke-3 se-Sumatera).

Namun provinsi Aceh juga memiliki peluang dan potensi, seperti: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,19 (tertinggi ke-4 se-Sumatera), ketimpangan 0,318 (terendah ke-4 se-Sumatera), angka putus sekolah 0,87% (terendah ke-5 se-Sumatera) dan inflasi 1,84% (terendah ke-3 se-Sumatera).

Dengan memperhatikan fakta dan data tersebut di atas, penting dilakukan mengingat dalam kriteria kawasan rawan Narkoba, ada 5 faktor pendukung yang memicu terjadinya kawasan rawan Narkoba, yaitu: tingginya kemiskinan. Makin tinggi angka kemiskinan maka akses untuk mendapatkan pendidikan

akan makin sulit yang berdampak naiknya angka pengangguran dan tingginya angka putus sekolah.

Oleh karenanya, Pemerintah sejak tahun 2008 telah memperkenalkan program *alternative development*, sebagai terobosan percepatan pembangunan bagi pembangunan Aceh yang mandiri, sejahtera dan berkelanjutan. Program ini terus dilakukan hingga hari ini (2019) dan didesain dalam Grand Design of Alternative Development (GDAD) 2016-2025 sebagai program pengurangan dampak buruk Narkoba (harm reduction) melalui pendekatan kesejahteraan dan berkelanjutan.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 2014 tentang peran serta masyarakat;
2. Instruksi Presiden RI nomor 6/2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN 2018-2019 khususnya rencana aksi pemetaan ladang Ganja dan Pengembangan potensi masyarakat di kawasan rawan dan rentan Narkoba;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang BNN;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Narkoba bagi Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pedesaan dan Pengentasan Daerah Tertinggal dan Tertentu Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas penggunaan dana desa tahun 2020;
6. Keputusan Menteri PPN atau Kepala Bappenas Nomor Kep.100/M.PPN/HK/08/2018 tentang pembentukan tim koordinasi perkuatan pembangunan alternatif di Aceh;
7. Keputusan Peraturan BNN RI Nomor 4 tahun 2018 tentang Grand Design BNN tahun 2018-2045;
8. Tindak Lanjut Rakor Dunia Usaha dalam mendukung Implementasi GDAD, di Jakarta, tanggal 26 September 2019 di Jakarta;
9. Tindak Lanjut Rakor Nasional Pengentasan Ganja dalam mendukung Implementasi GDAD, di Jakarta, tanggal 2-4 November 2019 di Jakarta;
10. Tindak Lanjut Paparan Survey Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia tahun 2019 oleh BNN dan LIPI, di Jakarta, tanggal 25 November 2019;

### C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Buku Juknis Implementasi GDAD ini adalah tersedianya dokumen yang memahami tentang Program AD, GDAD dan perencanaan jangka panjang GDAD yang berfokus pada upaya mengentaskan permasalahan Ganja di provinsi Aceh sekaligus membangun Aceh secara terpadu, mandiri, sejahtera dan berkelanjutan.

Sedangkan tujuan penyusunan Petunjuk teknis ini adalah untuk menjadi bacaan, acuan atau rujukan bagaimana program AD, implementasi GDAD dan tindak lanjut program AD dalam mewujudkan visi menjadikan Aceh dan Indonesia bebas penyalahgunaan Ganja dan Narkoba.

### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini membatasi bahasan tentang pemahaman tentang program AD, GDAD, petunjuk teknis kewirausahaan, capaian kerja (proses kegiatan) dan capaian kinerja (hasil yang dirasakan masyarakat) dalam trust building, capaian implementasi GDAD dan tindak lanjut GDAD tahun 2020-2025.

### E. Pengertian

1. *Pengembangan Sosial dan Budaya* adalah upaya pemerintah mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan kebudayaannya agar memiliki karakter manusia unggul dan menghargai kehidupan melalui perilaku hidup sehat, hidup hemat, kerja keras, sadar norma dan taat hukum, cinta lingkungan hidup, terbuka dengan perubahan, cinta damai dan hidup rukun, menjaga dan melestarikan hutan dan ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. *Peningkatan Keamanan dan Ketertiban* adalah upaya penegakkan hukum untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya pengentasan masalah kultivasi Ganja dan pemberantasan peredaran gelap Narkoba. Dengan menjaga keamanan dan ketertiban, program *Alternative Development* dapat dilangsungkan secara damai tanpa ada tekanan dan intervensi kepentingan

3. *Pelestarian Lingkungan Hidup dan Hutan* adalah upaya pemerintah menyelamatkan hutan dan melindungi lingkungan hidup dari aksi perusakan hutan oleh perambah hutan dan aksi kultivasi Ganja. Melestarikan hutan dan lingkungan menjadi faktor utama keberhasilan GDAD.
4. *Pengembangan Ekonomi* adalah upaya pemerintah membangkitkan sektor ekonomi yang sudah ada dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru. Melalui pengembangan ekonomi, potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam dapat ditingkatkan peluang dan manfaatnya dalam memperbaiki keadaan untuk mengubah keterbelakangan, ketertinggalan, kemiskinan dan pengangguran.
5. *Peningkatan ketahanan pangan* adalah upaya pemerintah melalui implementasi GDAD untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dengan pemberdayaan dan pembinaan kewirausahaan masyarakat dalam komoditi pangan. Ketahanan pangan dalam GDAD juga menjadi kunci keberhasilan dari aspek ketahanan bangsa yang lainnya, seperti: ketahanan energi, ketahanan ekonomi, ketahanan budaya dan lainnya.
6. *Mengembangkan agrowisata* adalah upaya pemerintah melalui implementasi GDAD untuk mengembangkan sektor wisata dengan kewirausahaan di bidang wisata dan membangun berbasis pertanian dan perdesaan. Agrowisata bertujuan mengangkat citra unggul daerah akan potensi sektor pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan sebagai tujuan mengundang investor untuk menanamkan investasinya
7. *Grand Design of Alternative Development (GDAD)* adalah Desain program pembangunan berkelanjutan sepuluh tahun (2016-2025) lintas K/L dan dunia usaha dalam rangka pengentasan Ganja di Aceh dengan pendekatan kesejahteraan melalui 6 tahapan dan berjangka waktu 2016-2025; dan
8. Program Alternative Development atau Pembangunan Alternatif adalah program pembangunan yang didesain khusus oleh UNODC dan ditransformasikan oleh pelaksana program AD dengan

memfokuskan pengembangan kearifan lokal dalam upaya pengentasan tanaman Narkotika.

#### **F. Sistematika**

Sistematika penulisan dalam buku ini, sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Program AD dan GDAD 2016-2025
3. Capaian Trust Building GDAD (2016-2018)
4. Capaian Implementasi GDAD tahun 2019
5. Rencana Tindak Lanjut GDAD periode 2020-2025
6. Penutup.



## BAB II

# PROGRAM ALTERNATIVE DEVELOPMENT DAN GRAND DESIGN OF ALTERNATIVE DEVELOPMENT 2016-2025

Program Alternative Development (AD) yang dijelaskan dalam bab ini, menggambarkan latar belakang lahirnya program AD di Indonesia sebagai wujud peran serta aktif Indonesia dalam keanggotannya di UNODC (*United Nations Office On Drug and Crime*) dimana negara dengan masalah kultivasi tanaman Narkotika dapat melakukan program AD sesuai dengan karakteristik di negaranya masing-masing. Selanjutnya perkembangan AD menjadi GDAD dan terpilihnya 3 *lokasi pilot project*, dijelaskan dalam sub bab berikut ini.

### A. Mengetahui Program *Alternative Development* (AD)

Fenomena adanya Ganja dari Aceh yang memiliki kadar THC (*Tetra-Hydro-Cannabinol*) yang menjadi komoditi dan terus dicari pasar Narkotika dalam dan luar negeri menjadi isu menarik dalam diskusi pada Sidang CND ke-53 tahun 2006 di Markas UNODC di Vienna, Austria. Beberapa negara yang terdampak dari peredaran gelap Ganja dari Aceh merasa perlu untuk mencari solusi dari masalah tersebut.

Oleh karenanya, delegasi Indonesia yang dipimpin Kepala Pelaksana Harian BNN Komjen Pol Made Mangku Pastika dan Konsultan Ahli Komjen Pol (P) Ahwil Lutan, melakukan konsultasi, diskusi dan usulan Kepala Direktur Eksekutif UNODC Mr. Mario Antonio Costa serta Ketua CND Mr. Hamid Godse untuk mengizinkan Indonesia menjadi negara yang memberlakukan program penanganan masalah tanaman Narkotika yaitu Program *Alternative Development* khusus untuk Ganja yang pertama di Dunia.

Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan dan strategi nasional P4GN melalui program AD untuk Aceh tahun 2008. Untuk menjalankan program tersebut, Indonesia langsung didampingi pelaksana program AD untuk tanaman Opium di Thailand yaitu Yayasan Mae Fah Luang Foundation yang merintis dan mengelola *Doi Tung Development Project* (DTDP) yang dipimpin oleh Mr. Disnada Diskul dan 30 Tim Ahli DTDP

yang bekerja bersama masyarakat di Lamteuba dan Maheung (keduanya di Aceh Besar).

Untuk program AD di Lamteuba dikembangkan sanitasi penyakit malaria, penanaman Jagung hibrida, perbaikan irigasi dan pengentasan penyakit ternak. Sementara untuk kawasan Maheung, dikembangkan peternakan kambing boer, perikanan, penggilingan padi dan sayuran.

Capaian program AD yang sudah dirintis Thailand mendapatkan perhatian UNODC dengan hadirnya Direktur Eksekutif UNODC *Mr. Maria Antonio Costa* ke Lamteuba, Aceh Besar pada tanggal 31 Januari 2009 untuk meresmikan *Sustainable Alternative Livelihood Development (SALD)*.

Momen penting inilah yang memperkenalkan Aceh Besar dan BNN ke forum internasional sebagai pencetus program AD untuk tanaman Ganja pertama di Dunia, meskipun pada tahun 2009 itu dalam laporan *World Drug Report (WDR) 2009* Indonesia bukan negara terbesar penghasil Ganja di dunia. Selain itu, Aceh juga menjadi bagian pilot project program AD Thailand, selain Afghanistan dan Laos.

Untuk menindaklanjuti prestasi besar tersebut, BNN melakukan revitalisasi kelembagaan dengan membentuk Kedeputusan Pemberdayaan Masyarakat dan Direktorat Pemberdayaan Alternatif. Selain itu untuk memetakan kerawanan lahan Ganja dan memetakan potensi kawasan, BNN melakukan Survey Pemetaan Ganja di Aceh tahun 2010 bersama 6 (enam) universitas se-Aceh di bawah koordinasi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Menurut hasil Survey Pemetaan Lahan Ganja dan Potensi komoditif Alternatif tersebut, terdapat 8 dari 23 kabupaten/kota di provinsi Aceh yang sering dilakukan operasi eradikasi Ganja karena keberadaan ladang Ganja di 8 kabupaten ini yang selalu berulang-ulang dari tahun ke tahun. Survey tersebut selain mengidentifikasi kawasan rawan Ganja di Aceh juga memetakan peta potensi pengembangan SDA yang ada di masing-masing Kabupaten, termasuk 3 pilot project.

Adapun ke-8 kabupaten tersebut, yaitu: Aceh Besar, Bireuen, Gayo Lues, Pidie, Aceh Utara, Aceh Tenggara, Aceh tengah dan Nagan Raya. Pada ke-8 kawasan ini muncul banyak masalah sosial dan ekonomi seperti: kemiskinan dan pengangguran, tingginya

angka kejahatan, maraknya kultivasi Ganja, penyelundupan Narkoba dan prekursor Narkoba, penyalahgunaan Shabu dan kerusakan lingkungan hidup dan hutan.

Dari hasil survey tersebut, BNN melalui Direktorat Pemberdayaan Alternatif melaksanakan program AD sesuai dengan rekomendasi hasil survey dan melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh program AD yang dirintis Thailand dengan mengadopsi pengalaman dari negara-negara yang melaksanakan program di berbagai negara seperti: *Doi Tung* (Thailand), *Balk* (Afghanistan), *Baguio* (Philippina) *Putumayo* (Colombia), Peru, dan Bolivia.

Program AD di Aceh terus berlanjut dari tahun 2010-2015, menysasar kawasan yang terdampak masalah kultivasi Ganja di Aceh dengan upaya alih fungsi lahan Ganja, alih profesi mantan penanam Ganja, menciptakan lingkungan perdesaan pulih dari kerawanan Narkoba dan membangun jejaring kerja, kolaborasi, sinergi dan kemitraan dengan instansi pemerintah (K/L), Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan dunia usaha termasuk orsosmas, praktisi dan akademisi.

Program AD pertama yang dilakukan BNN, adalah tahapan Sosialisasi program dan Survey (2008-2010) serta melakukan pemberdayaan alternatif di Lamteuba dengan tanaman Nilam seluas 3 Ha.

Setelah satu windu (2008-2016) program AD berjalan, Indonesia menorehkan banyak prestasi dalam mengentaskan permasalahan Ganja, dengan beberapa prestasi penegakkan hukum, antara lain:

1. Pada tahun 2014, Polda Aceh, Mendapatkan penghargaan UNODC atas operasi mengungkap ladang Ganja seluas 154 Ha di Aceh Besar sebagai penyitaan ladang Ganja terluas kedua di dunia setelah diungkap ladang Ganja di Arizona, USA
2. Pada tahun 2015, Polri dan BNN, berhasil menggagalkan peredaran Ganja sebesar 8.008 kilogram, sebagai upaya pengungkapan terbesar sepanjang sejarah Polri didirikan di Rokan hilir, Riau, pada truk menuju Bandung.
3. Pada tahun 2016, Polri dan BNN mencatat sebagai tahun pengungkapan lahan Ganja 487 Hektare sebagai penyitaan

lahan Ganja terbesar sepanjang sejarah Indonesia dan sejak Polri dibentuk.

Atas dasar keprihatinan inilah yang akhirnya menjadi dasar disusun desain pembangunan berkelanjutan, *Grand Design of Alternative Development 2016-2025*; agar semua komponen bangsa ikut serta dalam P4GN.

Kondisi Keprihatinan bangsa Indonesia akan tahun 2016 sebagai tahun Darurat Narkoba juga menjadi perhatian Presiden RI. Pada tanggal 24 Februari 2016 melakukan sidang Kabinet khusus yang membahas masalah Narkoba.

Menindaklanjuti sidang Khusus tersebut, BNN melalui Direktorat Pemberdayaan Alternatif, menyusun pedoman pemetaan kawasan rawan Narkoba di Indonesia. Selanjutnya di tiap wilayah dilakukan pemetaan kawasan rawan narkoba oleh Kabid P2M (Pencegahan & Pemberdayaan Masyarakat). Adapun Capaian kinerja dari kegiatan itu diterbitkan 654 kawasan rawan Narkoba di Indonesia. Melalui 8 indikator pokok dan 5 indikator pendukung, di setiap wilayah kecamatan di Indonesia dihimpun titik-titik rawan yang telah menjadi lokus penyelidikan dan penyidikan Polri sebagai basis wilayah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dari mulai pesisir, desa, dan kota hingga wilayah perbatasan negara.

Kemudian dalam rangka mengentaskan masalah Ganja yang menjadi isu Nasional dan Regional disusunlah *Grand Design of Alternative Development/GDAD (2016-2025)* khusus bagi 3 *Pilot Project* prioritas (hasil pemetaan Ganja 2010) yaitu: Aceh Besar (Lamteuba, Seulimeum), Bireuen (Meunasah Bungo) dan Gayo Lues (Agusen, Blangkejeren).

Dengan berpedoman pada dokumen kerja kawasan rawan dan GDAD di atas, BNN mendeklarasikan sebagai negara yang melaksanakan *Urban and Rural Development* di forum sidang bilateral *ASOD Meeting* di Brunei dan *ASEAN Member Meeting/AMM Meeting* di Singapore (2017), Sidang *Expert Group Meeting* di Vienna (2018) dan *sidang CND Meeting ke-53* di Markas UNODC di Austria dan *HONLEA Meeting* di Markas UNODC Asia Pasifik di Bangkok (2019).

Melalui pendekatan *urban and rural development* Dimana pada kawasan rawan di perkotaan dilaksanakan program *community*

*development* dan di kawasan rawan perdesaan (yang terdampak kultivasi Ganja) dilaksanakan program *Alternative Development*.

## **B. Mengenal Grand Design of Alternative Development (GDAD) 2016-2025 di Provinsi Aceh**

Gagasan penyusunan konsep GDAD 2016-2025 merupakan terobosan pemerintah dalam tanggap darurat Narkoba nasional, setelah upaya BNN mempromosikan pembangunan berwawasan anti Narkoba untuk mendapatkan legalitas baik perpres maupun inpres kepada Presiden RI.

Langkah mempromosikan GDAD diambil Kepala BNN, Bapak Budi Waseso untuk menunjukkan bahwa permasalahan Ganja yang sejak 12 tahun berturut-turut mendominasi Narkoba di Indonesia harus diselesaikan secara humanis melalui pendekatan kesejahteraan, sebagaimana negara yang memiliki tanaman Narkotika telah sukses dengan program AD.

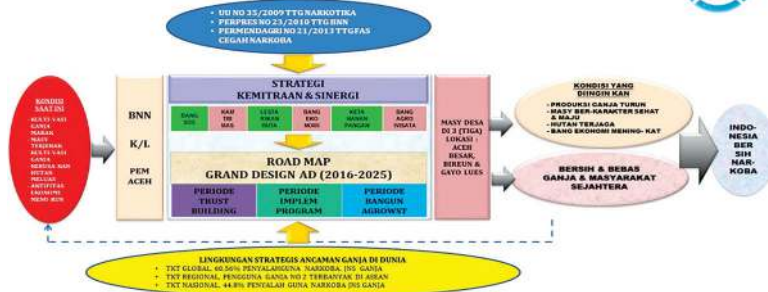
Selanjutnya BNN melakukan advokasi dan promosi GDAD ke seluruh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, 3 Pemerintah Kabupaten, Akademisi dan praktisi, organisasi sosial kemasyarakatan dan dunia usaha. BNN ingin menyadarkan pentingnya dukungan semua pihak untuk bersama-sama mengalokasikan program, kegiatan dan anggaran pembangunan fokus menasar 3 *Pilot Project* GDAD, yaitu: Aceh Besar, Bireuen dan Gayo Lues.

Bahkan promosi GDAD terus dilakukan dalam kunjungan kerja Kepala BNN ke Arab Saudi, Colombia, China dan berbagai kesempatan dalam pertemuan regional, bilateral dan multilateral.

Adapun Visi dari *GDAD 2016-2025* ini *adalah terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Sehat dan Bebas dari Produksi Ganja*.

Selanjutnya Visi ini diimplementasikan dengan 6 (enam) Misi, yaitu: (1) Menggantikan tanaman Ganja jadi komoditi unggulan daerah; (2) Mengalihprofesikan penanam Ganja jadi petani komoditi unggulan; (3) Meningkatkan kesejahteraan dan karakter budaya masyarakat; (4) Mengembangkan ekonomi dan meningkatkan pendapatan; (5) Meningkatkan kesadaran hidup sehat dan sadar hukum; (6) Menyatukan dan menggerakkan masyarakat melalui Kemitraan dan Sinergi.

## POLA PIKIR GRAND DESIGN ALTERNATIVE DEVELOPMENT



*Bagan Kerangka Berfikir GDAD 2016-2025*

Untuk melaksanakan misi, ada 3 Strategi dalam GDAD yang dijalankan, yaitu: (1) Menyatukan dan Menggerakkan intansi pemerintah dan Komponen masyarakat; (2) membangun kemitraan, jejaring kerja dan Sinergi dan (3) Mengimplementasikan secara bertahap dan berkelanjutan implementasi program *Grand Design Alternative Development* (2016-2025).

Sedangkan arah kebijakan dari penyusunan *Grand Design AD* (2016-2025) ini sesuai dengan kebijakan program AD dari Badan Dunia PBB dan ASEAN yaitu upaya memperlambat laju angka prevalensi Penyalahgunaan Narkoba. *Grand Design* ini juga sesuai dengan Nawacita yang membangun Indonesia dari pinggiran dan sesuai dengan misi pemerintahan Aceh membangun Aceh yang sejahtera, mandiri dan berkelanjutan.

Arah kebijakan GDAD 2016-2025 ini dalam jangka panjang diharapkan dapat mengubah kondisi permasalahan darurat Narkoba khususnya Produksi Ganja di Provinsi Aceh yang kian tak terkendali, yaitu: (1) marak dan meluasnya penanaman Ganja; (2) masyarakat terjebak dalam kultivasi Ganja; (3) kerusakan lingkungan dan hutan; (4) menurunnya aktifitas pengembangan ekonomi.

Kondisi yang ingin diubah dari GDAD 2016-2025, antara lain terwujudnya Aceh yang Bersih dari Produk-si Ganja dan Sejahtera dengan beberapa upaya, seperti: (1) pemetaan kawasan rawan kultivasi Ganja; (2) pembangunan manusia dan budaya; (3) melestarikan lingkungan hidup dan hutan dan (4) mengembangkan sektor ekonomi.

Program AD didesain menjadi dalam 6 (enam) sinergi dan kemitraan diantara K/L dan Pemerintah daerah dan dunia usaha, yaitu: (1) pengembangan sosial dan budaya; (2) meningkatkan keamanan dan ketertiban; (3) Melestarikan lingkungan hidup dan hutan; (4) pengembangan ekonomi; (5) meningkatkan ketahanan pangan; dan (6) pembangunan agrowisata.

*Grand Design* ini dirancang dalam 10 tahun dan 3 tahapan atau periode, yaitu: (1) Periode pertama; membangun kepercayaan 2016-2018; (2) Periode kedua; *Implementasi program* 2019-2024; (3) Periode ketiga; *Membangun Agrowisata* 2025.

Setiap tahun dalam periode tersebut disusun rencana aksi dari masing-masing K/L, Pemprov, Pemda dan Dunia usaha. Dalam rencana program, kegiatan dan anggaran diserahkan pada APBN masing-masing K/L dan Pemda sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya dan akan diusulkan APBNP kepada Presiden RI yang didahului dengan terbitnya Inpres.

Harapan bangsa dengan *Grand Design AD* tersebut, produksi Ganja menurun, jaringan peredaran gelap Ganja terungkap dan terputus, masyarakat terbangun karakternya melalui pola hidup sehat dan sadar hukum; terbina, terampil, maju dan mandiri serta memiliki usaha dari hulu (penanaman) hingga hilir (pemasaran).

Dengan beragam ketrampilan (pertanian dan non pertanian) masyarakat sasaran program GDAD dapat mengangkat harkat dan citra Aceh (khususnya) dan Indonesia (umumnya) sebagai wilayah dan Negara yang berhasil mengentaskan produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui pembangunan Agrowisata seperti Agrowisata di Doi Tung Thailand di masa yang akan datang.

### C. **Mengenal 3 Pilot Project GDAD (Aceh Besar, Bireuen dan Gayo Lues)**

Dalam ulasan sub bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa ada 8 Kabupaten di Provinsi Aceh yang marak terjadinya kultivasi Ganja secara berulang-ulang. Dari 8 kabupaten tersebut, dipilih 3 lokasi berdasarkan pertimbangan dan alasan strategis, yaitu: Aceh Besar, Bireuen dan Gayo Lues.

#### 1. **Aceh Besar**

*Secara geografis*, Kabupaten Aceh Besar terletak pada 5,05o – 5,75o Lintang Utara dan 94,99o –95,93o Bujur Timur.  
*Batas Wilayah*, Batas-batas wilayah Kabupaten Aceh

Besar adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Selat Malaka dan Kota Banda Aceh
- Sebelah Selatan: Kabupaten Aceh Jaya
- Sebelah Timur: Kabupaten Pidie
- Sebelah Barat: Samudera Indonesia

*Luas Wilayah*, Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah 2.903,5 km<sup>2</sup> dengan sebagian besar, wilayah-nya berada di daratan dan sebagian kecil berada di kepulauan. Sekitar 10% desa di Kabupaten Aceh Besar merupakan desa pesisir.

*Administrasi Pemerintahan*, Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 23 kecamatan, 68 mukim, dan 604 gampong atau desa.

*Komoditi unggulan* Kab. Aceh Besar, Lada, Ubi Kayu, Tembakau, Cengkeh, Ubi Jalar, Kemiri, Cabe, Kelapa, Kacang Hijau, Padi, dan Kopi

*Pengembangan Wilayah*. Pengembangan Kab. Aceh Besar sebagai kawasan Agropolitan dengan peningkatan produktivitas dan kualitas hasil panen dan Industri Pengolahan yang Tahan Bencana serta mengembangkan sistem pemasaran. Program AD di sini, telah dimulai sejak 2008.

## 2. Bireuen

*Secara geografis*, Kabupaten Bireuen berada pada titik koordinat antara 40 54' - 50 21' Lintang Utara (LU) dan 960 20' - 970 21' Bujur Timur (BT).

*Luas wilayah* Kabupaten Bireuen adalah 1.796,31 kilometer persegi (km<sup>2</sup>) atau seluas 179.631 hektar (Ha).

Secara administrasi, wilayah daerah Kabupaten Bireuen secara langsung berbatasan pada masing-masing sisi sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Selat Malaka;
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Utara;
- Sebelah Tenggara dengan Kabupaten Bener Meriah;
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Tengah;
- Sebelah Barat Daya dengan Kabupaten Pidie; dan
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Pidie Jaya.

*Administrasi Pemerintahan*, Pembagian wilayah administrasi pemerintahan dalam lingkup pemerintah Kabupaten Bireuen saat ini terdiri dari sebanyak 17 (tujuh belas) wilayah kecamatan, 68 mukim, dan 604 gampong atau desa.



*Komoditi unggulan*, Kab. Bireuen, Perikanan, Kelapa, Pinang, Kacang Hijau Ubi Kayu, Padi dan Jagung.

*Rencana Pengembangan*, Kabupaten Bireun dalam GDAD akan dikembangkan, sebagai kawasan Minapolitan, Agropolitan sesuai komoditi unggulan dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan, dan pengembangan Industri Pengolahan yang Tahan Bencana. Proram AD di Bireun telah dimulai sejak tahun 2014 oleh BNNK Bireun.

### 3. Gayo Lues

*Secara geografis*, Kabupaten Gayo Lues terletak pada posisi garis lintang 03°40'26" - 04°16'55" LU dan garis bujur 96°43'24" - 97°55'24" BT.

*Batas Wilayah*, batas-batas wilayah Kabupaten Gayo Lues adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Kab. Aceh Tamiang dan Kab. Langkat Propinsi Sumatera Utara;
- Sebelah Barat dengan Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Nagan Raya, dan Kab. Aceh Selatan;
- Sebelah Utara dengan Kab. Aceh Tengah, Kab. Aceh Tamiang dan Kab. Aceh Timur;
- Sebelah Selatan dengan Kab. Aceh Tenggara, Aceh Selatan dan Kab. Aceh Barat Daya.

*Luas Wilayah*, Kabupaten Gayo Lues berada di ketinggian berkisar dari 100-3.000 meter diatas permukaan laut (mdpl) yang merupakan daerah perbukitan dan pegunungan.

*Administrasi Pemerintahan*, Kabupaten Gayo Lues memiliki 11 kecamatan, 25 kemukiman, dan 145 kampung (136 kampung definitif, 9 kampung persiapan) yang terdiri dari 55 desa swadaya, 62 desa swakarya, dan 28 desa swasembada.

*Komoditi Unggulan*, Kab. Gayo Lues, Nilam, sereh wangi, Tembakau, Kemiri, Kopi, Cabe, Jagung

*Pengembangan Wilayah*, Pengembangan Kab. Gayo Lues sebagai kawasan agrobisnis, *agroforestry*, dan ekowisata untuk meningkatkan nilai tambah dan mengaitkan hasil pertanian dengan industri pengolahan. Program AD di Gayo Lues telah dimulai sejak tahun 2015 oleh BNNK Gayo Lues.



*Presiden RI Memimpin Sidang Kabinet khusus membahas masalah Narkoba, 24 Februari 2016*



*Penanaman Lanjutan Jagung di Kabupaten Aceh Besar Di lahan seluas 30 Hektar, tanggal 12 Desember 2019*



*Bupati Gayo Lues & Ka BNNP Aceh Mempromosikan Produk Masyarakat Binaan GDAD di Gayo Lues*



*Masyarakat Binaan BNN dalam Program AD di Lamteuba dalam Pengembangan Komoditi Nilam, tahun 2012*

## BAB III

### TEKNIS IMPLEMENTASI GDAD

Teknik implementasi dalam Bab ini menjelaskan bagaimana tahapan program AD dan GDAD telah dimulai oleh BNN di kawasan rawan narkoba yang terpilih setelah ditentukan kerawanan narkoba baik dengan Survey maupun indicator kerawanan narkoba sesuai Cetak Biru Pemberdayaan Masyarakat BNN. Teknik implementasi ini diadopsi dari mengikuti pedoman melakukan program AD oleh UNODC, dengan tahapan yang dijelaskan dalam sub bab berikut ini.

#### A. Pemetaan Potensi Wilayah (Analisis SWOT)

Dalam memulai intervensi program di kawasan rawan Narkoba diperlukan suatu data dan informasi yang aktual dan faktual yang diperlukan dalam menjawab setiap permasalahan, kendala, tantangan dan ancaman yang mungkin akan dihadapi selama pelaksanaan kegiatan.

Untuk mengidentifikasi dari kekuatan (*Strong*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*Threat*) wilayah dan masyarakat yang akan dibina dilakukan analisis SWOT. Melalui analisis SWOT dipetakan strategi apa yang sesuai dengan kondisi wilayah dan masyarakat, sehingga kegagalan dini dapat diantisipasi dan dicarikan solusi alternatif.

Mengidentifikasi kekuatan, dapat dilihat antara lain: sumber daya manusia dan alam yang tersedia, akses jalan dan komunikasi, kelembagaan yang telah terbentuk, ketersediaan pasar, kearifan lokal (adat) yang dikembangkan, regulasi dan program kerja pemerintah daerah yang sedang berjalan.

Mengidentifikasi kelemahan, dapat dilihat dari kurangnya akses komunikasi antara warga, kurang layaknya fasilitas sosial dan fasilitas umum, kurang partisipatifnya masyarakat mengikuti program pemerintah, kurang responsifnya pelayanan dari aparat yang dirasakan masyarakat, minimnya kegiatan bersama di masyarakat, tidak optimalnya pelaksanaan program pemerintah di kawasan ini.

Mengidentifikasi peluang, dapat dilihat dengan merasakan geliat sosial warga melalui kegiatan bersama, geliat ekonomi dengan banyaknya usaha beragam dan pasar, keberadaan perusahaan di sekitar kawasan, produk unggulan daerah yang dikembangkan, kegiatan dan hasil budaya daerah yang masih terpelihara, peninggalan sejarah yang masih dirawat/ dijaga, dan lainnya.

Mengidentifikasi ancaman dapat dilihat dengan mendengarkan informasi dari warga terkait kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di wilayah tersebut, adanya kasus kejahatan yang kerap terjadi, pendatang dari luar yang kurang dikenal warga di wilayah tersebut, tempat hiburan yang buka hingga larut malam, pelabuhan tikus yang langsung ke laut, lokasi berdekatan dengan tempat transit, seperti: terminal barang, bandara, pelabuhan dan lapas.

Dari beberapa identifikasi SWOT di atas, diambil beberapa faktor yang dirangking paling dominan. Kemudian dianalisa dengan SWOT untuk dipilih strategi apa yang paling prioritas untuk dilakukan. Selain analisa SWOT, juga perlu dipetakan potensi kawasan melalui analisis data geografi potensi warga binaan melalui data demografi.

## **B. Mekanisme Pemetaan Potensi Kawasan dan Masyarakat**

Dalam memulai intervensi program P4GN di kawasan rawan Narkoba, terlebih dahulu dipilih kawasan rawan yang telah diidentifikasi rangking kerawanannya. Kemudian dilakukan pemetaan potensi kawasan dan masyarakat sebagai modal dasar mengubah kondisi kerawanannya menjadi kondisi kawasan yang unggul dengan potensi kawasan dan masyarakat.

Adapun mekanisme untuk memetakan potensi kawasan dan masyarakat, dilakukan dengan beberapa metode, yaitu: *Focus Group Discussion/FGD* atau diskusi kelompok terbatas, pencatatan data, kunjungan kelokasi sambil berdiskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pelaku usaha, aparat dan pejabat.

Melalui FGD, dibangun diskusi untuk menyamakan persepsi, visi dan misi sekaligus mensosialisasikan betapa pentingnya P4GN melalui kewirausahaan sebagai pendekatan humanis dalam pengurangan dampak buruk Narkoba. Dalam forum ini, diundang

tokoh kunci dan tokoh penting yang memiliki pengaruh dan ditokohkan oleh masyarakat.

Kemudian melalui kunjungan dan audiensi kepada masyarakat, tokoh, pejabat, aparat dan pemangku kepentingan di wilayah, dilakukan observasi, advokasi, komunikasi, koordinasi, dibangun sinergi dan dikembangkan kemitraan agar saling memiliki peran serta dalam rencana program kewirausahaan yang akan dilakukan di wilayah tersebut.

### **C. Target sasaran Pemetaan Potensi Kawasan dan Masyarakat**

Dalam melaksanakan pemetaan potensi kawasan dan masyarakat, harus fokus memetakan target sasaran dari pemetaan tersebut melalui pihak, badan, kelembagaan dan pengembang potensi di daerah. Target sasaran pelaksanaan pemetaan potensi, antara lain:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/ Bappeda
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten
3. Badan Pusat Statistik (BPS) di kabupaten/Kota
4. Dinas-dinas pembangunan daerah Kabupaten/ Kota
5. Kelembagaan-kelembagaan yang tersedia di wilayah
6. Pasar dan pusat pemasaran hasil-hasil bumi;
7. Koperasi dan Usaha Simpan Pinjam
8. Lembaga permodalan dan kredit di wilayah tersebut.
9. Unit-unit usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di kawasan tersebut.
10. Kegiatan bersama warga baik sosial, ekonomi dan kebudayaan;
11. Kalangan dunia usaha/perusahaan-perusahaan;

### **D. Target Keluaran dan Hasil Pemetaan Potensi**

Dengan analisa SWOT dan mekanisme pemetaan potensi kawasan dan masyarakat target, maka keluaran yang diharapkan adalah laporan informasi terstruktur tentang hasil pemetaan potensi melalui analisa SWOT dan rencana strategi yang akan dikembangkan dengan hasil tersebut. Sementara, target capaian hasil dari pemetaan potensi kawasan dan warga binaan ini, memberikan manfaat dalam perencanaan kegiatan kewirausahaan, terkait rencana kegiatan yang meliputi:

1. Peserta kewirausahaan yang akan dipilih;
2. Pendamping kawasan yang akan dibina
3. Jadwal, Waktu dan lokasi kegiatan
4. Narasumber dan instruktur yang mengajar
5. Model kewirausahaan yang akan diintervensikan
6. Materi dan metode yang akan disampaikan
7. Bahan dan alat yang akan disiapkan
8. Kelembagaan yang akan dibangun
9. Sinergi dan kemitraan yang akan dikembangkan
10. Anggaran dan Sumber Anggarannya
11. Mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang akan dilakukan.

Target keluaran dan hasil pemetaan tersebut harus sudah dipedomani dalam kegiatan rapat kerja pemetaan dalam rapat perencanaan dan dikomunikasikan kepada target selama pelaksanaan bersama masyarakat. Hal ini akan mempermudah pelaksanaan program dan membangun sinergi dan kemitraan.

#### **E. Pengembangan Kapasitas Kewirausahaan**

Dalam rangka melakukan perubahan kondisi kawasan dan masyarakat dari rawan Narkoba menjadi tidak rawan Narkoba diperlukan upaya pengembangan kapasitas baik untuk kawasan dan masyarakat yang akan dibina secara faktual memberikan solusi alternatif untuk tidak lagi terlibat sindikasi Narkoba dan berkelanjutan.

Model Kewirausahaan merupakan salah satu strategi pengembangan kapasitas yang tepat untuk mencapai tujuan itu. Melalui pengembangan kapasitas kewirausahaan, masyarakat dapat diajak melakukan pembelajaran sambil melakukan kegiatan yang mengubah diri dan lingkungannya serta menciptakan produk yang bernilai jual tinggi yang berdampak menambah pendapatan.

#### **F. Pengukuran Keberhasilan Program**

Setiap intervensi program kawasan rawan narkoba, seperti implementasi GDAD di 3 pilot project AD di Aceh, pelaksanaan program diakhiri dengan mengevaluasi hasil monitoring program sejak mulai pemetaan potensi masyarakat dan wilayah hingga

mengukur keberhasilan program kewirausahaan dan indeks keterpulihan kawasan rawan (IKKR) Narkoba.

Pengukuran keberhasilan program dilakukan pelaksana program di BNN, BNNP dan BNNK dengan kuesioner pemantauan keberhasilan program dan Survey Kepuasan Masyarakat. Melalui pengukuran ini indicator keberhasilan kewirausahaan dapat dianalisis factor-faktor yang paling kuat dan paling lemah dalam capaian kinerja yang dirasakan masyarakat.

Selanjutnya untuk melihat apakah intervensi program memberikan dampak bagi keterpulihan kawasan rawan narkoba dari kategori bahaya menjadi waspada, siaga dan aman, dilakukan dengan kuesioner yang terdiri 20 item yang mengukur skala, apakah di wilayah tersebut terjadi perubahan kondisi dengan keberhasilan program.

Untuk lebih rinci tentang memahami kewirausahaan dalam pemberdayaan kawasan rawan Narkoba dapat dibaca dalam buku ***Petunjuk Teknis Kewirausahaan bagi kawasan rawan Narkoba.***





*Bimbingan kewirausahaan lifeskill pembuatan kawat bronjong di 3 lokasi Pilot Project GDAD*



*Kewirausahaan dalam pembuatan pakan ternak berbahan Jagung oleh BNNK Bireun pada petani di Mns Bungo*



*Pada setiap pembinaan kewirausahaan program dan Kegiatannya dipantau dan diukur keberhasilannya*



## BAB IV

### CAPAIAN TRUST BUILDING GDAD (2016-2018)

Pada tahap membangun *trust building* (2016-2018), BNN melakukan program desiminasi, advokasi, koordinasi dan audiensi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat (termasuk akademisi, praktisi dan dunia usaha) baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Latar belakang membangun *trust building* untuk membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat membangun Aceh yang bersih Narkoba, sejahtera, mandiri dan berkelanjutan.

Di beberapa forum dunia dan pertemuan bilateral dan multilateral, membangun kepercayaan terus ditumbuhkan tentang pentingnya program AD sebagai upaya dunia mengubah kondisi kultivasi tanaman Narkoba dengan pendekatan kesejahteraan yang didesain khusus dengan kondisi masing-masing wilayah (keafiran Lokal). Dalam membangun kepercayaan tersebut, BNN menjelaskan konsep GDAD 2016-2025 sebagai *roadmap* mewujudkan Aceh dan Indonesia yang bersih Narkoba.

Beberapa capaian kerja dari hasil kegiatan promosi GDAD dan capaian kinerja yang dirasakan masyarakat khususnya di lokasi *Pilot Project* tersebut dijelaskan dalam sub bab berikut.

#### **A. Capaian Kerja *Trust Building* oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Akademisi**

Pada tahap membangun *trust building* (2016-2018), BNN memperkenalkan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat (termasuk akademisi, praktisi dan dunia usaha) tentang program AD sebagai upaya dunia mengubah kondisi kultivasi tanaman Narkoba dengan pendekatan kesejahteraan yang humanis dan produktif.

Beberapa respon dari K/L dimotori oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang mendukung pelaksanaan program AD sebagai percepatan pembangunan di provinsi Aceh yang berkelanjutan, untuk terus didukung alokasi program dan anggaran pembangunan dari K/L, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga melakukan percepatan pembangunan di provinsi Aceh.

Dari Bappenas, GDAD mendapat dukungan dari beberapa K/L, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan dunia usaha, antara lain:

1. **Kementerian Sekretaris Kabinet**, mendukung percepatan konsep GDAD yang disampaikan Presiden RI pada Sidang Kabinet Khusus (2016) dan sambutan Presiden RI dalam berbagai forum pertemuan termasuk Peringatan HANI 2016-2018, dan terbitnya Inpres Nomor 6/2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN 2018-2019.
2. **Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan**. Melalui koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan, lintas Kementerian dan Lembaga Menteri Koordinator Polhukam Bapak Wiranto (2016) mengkoordinasikan pentingnya penanggulangan Narkoba di Aceh sebagai upaya memutus permasalahan Narkoba dari akarnya. Sehingga setiap K/L yang memiliki Tupoksi bagi terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif di Aceh untuk membantu BNN dalam GDAD;
3. **Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala Bappenas)**. Melalui pemaparannya pada Rakornas program AD (2017), Kepala Bappenas Bapak Sumantri Brodjonegoro mendukung program AD sebagai upaya percepatan pembangunan di provinsi Aceh. Pasca Rakornas diterbitkan Instruksi Menteri tentang desk AD yang bertugas memonitor pelaksanaan program AD dan memberikan arahan agar K/L, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota untuk terlibat mendukung suksesnya program AD.
4. **Kementerian Pertanian**. Melalui alokasi program dan anggaran melakukan penanaman perdana komoditi jagung di Lamteuba (2017), Agusen dan Meunasah Bungo (2018). Bahkan Menteri Pertanian Hadir dan beserta Jajarannya hadir dalam acara tersebut.

Menteri Pertanian, Bapak Amran Sulaiman, menyatakan mendukung upaya memperkuat ketahanan pangan melalui GDAD dan siap membantu mantan penanam Ganja yang ingin beralih profesi menjadi petani komoditi unggulan di lahannya.

Upaya itu terus berlanjut hingga tahun 2019 dengan bantuan penanaman jagung di areal 84 hektar (Aceh Besar dan Gayo Lues) dan area 11.017 hektar (di Bireuen). Kementerian

- Pertanian juga membantu peremajaan kopi di area seluas 1.500 hektare di sekitar bantara Sungai Agusen di desa Agusen, Gayo Lues.
5. **Kementerian Desa dan Pengentasan Daerah Tertinggal dan Tertentu (PD TT)**. Menteri Desa dan PD TT mendukung upaya BNN dalam mengembangkan desa dengan produk unggulan melalui kerjasama dan terus berlanjut menerbitkan Permendesa nomor 11/2019, dimana dana bantaun desa dapat membantu upaya pencegahan Narkoba termasuk program AD. Bahkan Kementerian Desa dan PD TT membantu peralatan produksi dan pengolahan kopi bagi kelompok tani di desa Agusen (Gayo Lues) tahun 2018.
  6. **Kementerian Luar Negeri**, mengapresiasi langkah-langkah BNN dalam kerjasama bidang AD dengan memberikan dukungan dalam forum internasional baik di sidang umum PBB (*UNGASS 2016 meeting*), Sidang *Expert Group Meeting (2018)*, Sidang *ASOD Meeting di Brunei (2018)*, bahkan berlanjut di tahun 2019 pada sidang ke-43 CND Meeting dan Sidang *Honlea Meeting* di Bangkok. Kemenlu juga memfasilitasi pertemuan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Thailand di Yogyakarta (2018) dan dilanjutkan di Chiang Rai (2019) di bidang AD dan kerjasama pengembangan Sumber Daya Manusia.
  7. **Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**. melalui Bank BRI mendukung pembangunan balai warga di Bireuen dan Gayo Lues (2018). Bank Mandiri juga memberikan dukungan dana sosial (CSR) bagi pembelian produk masyarakat binaan untuk pameran produk di Vietnam pada sidang *Expert Group Meeting (2018)*. Bantuan Kemen BUMN terus berlanjut di tahun 2019 dengan program BHUN (*BUMN Hadir Untuk Negeri*) memberikan bantuan, pelatihan dan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum di Aceh dan 18 lokasi kawasan rawan se-Indonesia.
  8. **Kementerian Dalam Negeri**, melalui Permendagri Nomor 21/2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Narkoba bagi Instansi

Pemerintah, mengharuskan K/L, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan program dan anggaran untuk P4GN, termasuk implementasi GDAD di Aceh. Kemendari dan BNN juga membentuk Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar).

9. **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU dan PR)**, melalui kebijakan dan strategi dalam bidang pembangunan infrastruktur telah memberikan banyak dukungan bagi terbangunnya infrastruktur dan Kemudahan akses fasilitas umum (bina marga) dalam pembangunan.

Beberapa capaian yang telah dilakukan adalah perbaikan jalan, pembukaan dan penambahan akses jalan, pembangunan bandara blangkejeren, gayo Lues (2018). Dinas Bina Marga juga membantu pembangunan jalan tembus di Lamteuba (2017). Pembangunan jalan baru di desa pepelah Gayo Lues (2019); Pembangunan jalan lingkaran luar di Bireuen.

10. **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**. Dengan program perhutanan Sosial, reboisasi dan pengembangan *Taman Nasional Gunung Leuser* (TNGL), satuan kerja Kemen LH dan Kehutanan memberikan hak pengelolaan hutan desa kepada lembaga pengelola hutan melalui pengembangan hutan produksi, pengelolaan TNGL untuk dikembangkan menjadi agrowisata di Gayo Lues di areal seluas 1.276 hektar yang berada di kawasan hutan lindung di desa Agusen (2018).

11. **Badan Narkotika Nasional**. Sebagai inisiator GDAD, BNN merasa perlu untuk menjadi pionir, promotor, kolaborator dan dinamisator GDAD. Melalui program P4GN, BNN melihat program AD merupakan upaya P4GN yang bertujuan mengentaskan Ganja dengan pendekatan kesejahteraan.

Oleh karenanya, semua satuan kerja di dalam BNN (Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, pemberantasan, hukum dan kerjasama, kesekretariatan) harus mendukung dan bergerak bersama dan berkolaborasi, baik di tingkat BNN, BNN Provinsi Aceh dan BNN Kabupaten/Kota.

12. **Kepolisian Negara Republik Indonesia.** Melalui Mabes Polri, Polda Aceh dan Polres di Kabupaten terus melakukan penyelidikan, penyidikan, operasi radikasi Ganja, mengungkap jaringan sindikat Narkoba, memutus jalur peredaran gelap, menggagalkan penyelundupan, menuntut hukuman maksimal kepada tersangka, pembinaan babikamtibmas dan melakukan kerjasama penegakkan hukum dengan BNN, BNNP, BNNK dan jajaran penegak hukum di Aceh (Jaksa, pengadilan, pabean, lapas, rutan, dll).

**Tabel Capaian peningkatan keamanan & ketertiban Masyarakat  
Pengungkapan kasus Narkoba di Polda Aceh 2016-2018**

TP Narkoba Aceh	2016	2017	2018	Jumlah	Rata2
Kasus (kss)	1.444	1.526	1.600	4.570	1.523
Tersangka (org)	1.940	2.153	2.213	6.306	2.102
BB Ganja (ton)	13,2	15,9	52,9	82	27
BB Luas Lahan (Ha)	487	103,5	71,5	662	221
BB Shabu (Kg)	77,6	44,9	58,6	181	60
BB XTC (Butir)	113	3.813	5.685	9.611	3.204

Sumber : Dit IV/Polda Aceh, 2019

13. **Tentara Nasional Indonesia.** Melalui instruksi Panglima ABRI mendukung pelaksanaan P4GN, khususnya dalam memetakan kawasan kultivasi Ganja membantu BNN dan Polri untuk menemukan lahan-lahan Ganja, membina Babinsa, membantu peningkatan pendapatan melalui program cetak sawah di beberapa Kabupaten di Aceh secara berkelanjutan; termasuk membantu akses para mantan kombatan untuk mendapatkan kesempatan melakukan pengolahan lahan sekurang-kurangnya 2 hektare.
14. **Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN).** Melalui Direktorat penginderaan jauh mendukung pemetaan ladang-ladang Ganja melalui penginderaan jauh dengan satelit, drone dan pesawat tanpa awak lainnya untuk mendapatkan informasi titik koordinat dimana Ganja ditanam di hutan-

hutan di seluruh Aceh, secara berkala dengan monitor dan pelaporan serta kerjasama dengan Polri, Polda Aceh, BNN dan BNNP Aceh.

15. **Pemerintah Daerah Provinsi dan Forkompinda Aceh.** Melalui regulasi menerbitkan Qanun dan peraturan gubernur, yang mengalokasikan program dan anggaran bagi kegiatan untuk mendukung program AD di *Pilot Project* serta mengajak seluruh Bupati dan Walikota untuk mendukung program P4GN, khususnya program AD sebagai tanggap darurat Narkoba di Aceh. Melalui jajran dinas pemerintah menggelontorkan program dan anggaran bagi pembangunan jalan dan fasilitas umum, perbaikan bendungan dan irigasi, pemberian bantuan saprodi, bantuan pelatihan, Bumdes dan membentuk satuan Tugas AD untuk mensukseskan program AD.
16. **Pemerintah Daerah Kabupaten dan Forkom-pinda Kabupaten,** melalui jajran kepala Dinasnya mengawal dan menyalurkan program kerja K/L dan Pemerintah Provinsi menjadi kegiatan nyata yang dirasakan masyarakat binaan BNN di *Pilot Project* AD maupun masyarakat yang memiliki potensi rawan untuk dijadikan lokasi pembinaan program AD berikutnya. Pemda juga terus mensosialisasikan implementasi peraturan bupati dan *Reusam* (Aturan adat) yang mengatur pelaksanaan P4GN di desa
17. **PT Bintang Toejoe,** yang mewakili dunia usaha, juga melakukan pengembangan kapasitas masyarakat yang terdampak kultivasi Ganja dengan melakukan kerjasama dan kolaborasi program AD dengan melakukan penanda tangan MOU dan PKS serta membekali petani di Aceh Besar dalam pengembangan komoditi jahe merah sebagai alternatif pendapatan dan peningkatan komoditi unggulan di daerah. Pada tahun-tahun berikutnya (hingga 2019) banyak trust building yang diinisiasi mendukung GDAD di Aceh, seperti: PT Japfa.
18. **Universitas Syiah Kuala dan IAIN Ar Raniry.** Melalui pendampingan dan pengabdian masyarakat oleh kalangan akademisi dalam kuliah kerja nyata, kuliah lapangan, studi

ilmiah, seminar dan beragam forum lainnya memberikan dukungan dan masukan yang konstruktif bagi pengembangan program AD sebagai alternatif pengentasan Ganja melalui pembangunan di kawasan yang terdampak kultivasi dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat petani. Salah satu inisiatif Unsyiah adalah pengembangan kandang ayam dan agro-bisnis peternakan dan studi nilam.

Capaian-capaian kerja dalam tahapan trust building di atas, hanyalah beberapa gambaran yang menonjol dari bentuk membangun kepercayaan dalam program AD. Namun Fakta di lapangan, lebih banyak stakeholder yang telah mengimplementasikan GDAD di Aceh.

## **B. Capaian Kinerja Trust Building yang Dirasakan Masyarakat Aceh Besar, Bireuen dan Gayo Lues**

Beberapa capaian kerja dalam tahapan membangun trust building (2016-2018), telah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang menjadi *Pilot Project*. Dampak program yang dirasakan masyarakat, secara sosiologis, disebut sebagai wujud keberdayaan masyarakat, yaitu terbagi dalam 4 daya, yaitu: keberdayaan manusia, keberdayaan lembaga, keberdayaan lingkungan dan keberdayaan usaha.

Secara ringkas 4 (empat) daya tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut:

*keberdayaan manusia* diwujudkan dengan adanya perubahan mindset berfikir manusia, perubahan karakter, meningkatkan ketrampilan dan berubah sikapnya dari apatis menjadi optimis dan dari konsumtif menjadi produktif. Salah satu bentuk keberdayaan manusia, masyarakat menyadari ancaman hukuman jika menanam dan mengedarkan Ganja, masyarakat menjadi terampil dengan mengikuti bantuan dalam program ketrampilan dan lainnya.

*Keberdayaan kelembagaan* diartikan sebagai keberdayaan dari lembaga (norma, adat dan aturan) di masyarakat yang mulai memahami bahaya Narkoba dan mengatur pencegahannya.

Hasilnya adalah menjadikan nilai hidup sehat dan anti Narkoba sebagai pola hidup yang sehat dan menjaga ketertiban masyarakat. Salah satu bentuk keberdayaan kelembagaan adalah berlakunya Reusam yang dipatuhi seluruh masyarakat, dimana setiap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba mendapatkan sanksi sosial.

*Keberdayaan lingkungan* dijelaskan sebagai bentuk respon lingkungan yang membentuk system tindakan, kegiatan, program, anggaran yang berkelanjutan dalam P4GN. Salah satu bentuk kelembagaan lingkungan, masyarakat bersepakat untuk mengalokasikan anggaran BUMDES untuk membiayai program P4GN dan untuk membangun akses jalan yang membantu produksi dan transportasi. Pada tingkat pemda, sudah teralokasikan program dan anggaran mendukung GDAD di lokasi *Pilot Project* dan sebagainya.

*Keberdayaan usaha* dimaknai bahwa masyarakat telah berhasil mewujudkan sebuah usaha dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Baik kemudahan membuat usaha baru non pertanian, mendapatkan akses permodalan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha, memiliki akses produksi untuk mengolah bahan baku menjadi bahan jadi, akses pemasaran untuk mengembangkan pasar.

Salah satu bentuk keberdayaan usaha adalah pengusaha kunyit di lamteuba yang memiliki usaha kunyit aslam; pengrajin kawat bronjong di Bireuen yang memiliki jasa melatih membuat kawat bronjong dan pengusaha kopi dari Blangkejeren (Gayo lues) yang memiliki usaha wisata kopi dan produk dengan banded kopi Agusen yang telah dikenal masyarakat.

Beberapa capaian kinerja (hasil yang dirasakan) dari trust building yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di 3 *Pilot Project*, antara lain:

#### 1. *Pilot Project Aceh Besar*

- a. Kementerian Pertanian, Penanaman Perdana Jagung di Lamteuba yang dihadiri oleh Menteri pertanian, berdampak meningkatkan pembangunan sektor pertanian di wilayah ini. Termasuk bantuan saprodi dan peralatan pertanian.



- b. *Badan Penyuluh Pertanian*, Meningkatkan penyuluhan, bimbingan, pendampingan dan pemasaran pasca panen, pembinaan kelompok petani, mantan penanam Ganja di wilayah ini telah berhasil panen padi varietas agogo dan kedelai yang bergantian sepanjang tahun.
- c. *Bank Syariah Aceh* pada pembangunan pertanian banyak membantu petani di Lamteuba, Aceh Besar, dalam usaha tani, bantuan pagar, herbisida, dan modal usaha dan peralatan dalam mengembangkan kewirausahaan kunyit.
- d. *Kopertis Perguruan Tinggi* di provinsi Aceh memberikan ijin perkuliahan Perguruan Tinggi seperti *Universitas Iskandar Muda (Unida)* untuk melaksanakan perkuliahan bagi mahasiswanya di Lamteuba sebagai solusi tingginya putus sekolah di wilayah ini.
- e. *Program P4GN oleh BNN dan BNNP Aceh*, meningkatkan kepercayaan masyarakat di Aceh Besar karena kehadiran program dan kegiatan yang berkelanjutan dalam membina kewirausahaan, seperti: kopi, kunyit, kakao dan jaban.
- f. *Kepercayaan Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Besar*, mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan jalan tembus Lamteuba memudahkan akses masyarakat bersekolah dan berdagang;
- g. Kerjasama dan kolaborasi antara *Polres Aceh Besar, Kodim Aceh Besar dan Tokoh Masyarakat* yang saling percaya, membuahkan animo masyarakat Lamteuba memberikan laporan terkait aksi kultivasi Ganja;
- h. Kepedulian PT *Bintang Toejoe*, dalam melatih kewirausahaan komoditi jahe merah mendapatkan sambutan antusias dan masyarakat berharap program jahe merah dapat berlanjut hingga pemasaran dan penjualan produknya.

## 2. *Pilot Project di Bireuen*

- a. *Kementerian Pertanian*, juga hadir dalam peluncuran Penanaman Perdana Jagung di gampong Meunasah Bungo, Peudada yang dihadiri Kementerian Koperasi dan UKM dan Bappenas, sebagai bukti dukungan terhadap implementasi GDAD di Bireuen;
- b. *Dinas Pertanian Kabupaten Bireun* terus melakukan pendampingan bagi kelompok tani yang tergabung dalam *Pilot Project* di meunasah bungo dengan pendampingan pembuatan pakan ternak berbahan Jagung, pembangunan kandang kambing dan melanjutkan penanaman Jagung hingga pendampingan panen;
- c. *Dinas Bina Marga Kabupaten Bireun*, membantu pelaksanaan penanaman perdana GDAD di lokasi untuk selanjutnya lokasi tersebut terus akan dijadikan media komunikasi antar kelompok, media pertemuan pengunjung dari K/L dan lokasi pelatihan.
- d. *BNN dan BNNK Bireun* memberikan bimbingan teknis (lifeskill) kewirausahaan dalam pembuatan kue (20 orang wanita tani), pelatihan kawat brojong (48 orang remaja dan pemuda), pelatihan pembuatan pakan ternak (15 orang)
- e. *BNN dan BNNK Bireun* juga memberikan pengembangan kapasitas bagi penggiat anti Narkoba di lingkungan kerja, lingkungan pendidikan dan pondok pesantren dan lingkungan masyarakat (170 orang).

## 3. *Pilot Project di Gayo Lues*

- a. *Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten Gayo*, ikut berperan aktif mensukseskan penanaman Perdana Kopi dengan tumpeng sari bawang di desa Agusen. Peran aktif itu diwujudkan dengan persiapan lokasi hingga pendamping dinas pertanian sampai hasil tumpeng sarinya panen.

- b. *Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues* memberikan perhatian bea siswa belajar bagi 7 remaja di Agusen untuk kurss Bahasa Inggris di kampung inggris di desa pare, Kediri, Jawa timur selama 3 bulan. Juga memberikan perhatian dalam pengembangan kawasan Agusen sebagai desa wisata arum jeram di sungai Agusen.
- c. *TNI, Kodam Iskandar Muda dan Kodim* di Gayo Lues, berkolaborasi melakukan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMMD) membangun infrastruktur dan cetak sawah di wilayah Gayo Lues.
- d. *Jajaran Polres dan Polsek Gayo Lues*, terus melakukan penyelidikan, penyidikan, operasi eradikasi Ganja dan pemberantasan Narkoba di pegunungan Gayo Lues, khususnya di kecamatan Pining, putri betung dan Agusen.
- e. *Dinas Bina Marga Kabupaten Gayo Lues* terus membangun kawasan di bantaran sungai Agusen untuk mencegah banjir dan melanjutkan pemba-ngunan jalan menuju wilayah desa pepelah, kecamatan pining sebagai jalan alternatif dan memudahkan akses transportasi.
- f. Melalui Permendesa nomor 11/2019 tentang alokasi program dan anggaran BUMDES untuk mendukung program P4GN, Badan Pemberdayaan masyarakat, memberikan dukungan pemanfaatan dana desa untuk membangun jalan di desa Pepelah, membuka akses masuk ke air terjun dan dukungan penanaman Jagung.



*Trust Building BNN dalam GDAD dengan Bupati Bireun dan Bupati Aceh Besar*



*Penanaman Perdana GDAD di Gayo Lues*

## BAB V

### CAPAIAN IMPLEMENTASI GDAD TAHUN 2019

Pada tahap implementasi GDAD tahun pertama 2019, pada setiap dalam GDAD terus dimonitor dan dievaluasi sejauhmana tahapan trust building memberikan dampak bagi implementasi GDAD pada tahap berikutnya. Dalam petunjuk Teknis GDAD ini dibahas tentang pengertian, capaian kerja (yang telah dilaksanakan), capaian kinerja (hasil yang dirasakan masyarakat) dan Tantangan tahapan ini di masa kini dan masa yang akan datang.

Adapun 6 (enam) tahapan dalam GDAD yang dilaksanakan dalam 6 tahun (2019-2024) implementasi GDAD, yaitu: Pengembangan Sosial dan Budaya, Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, Pelestarian lingkungan dan hutan, pengembangan ekonomi, peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan Agrowisata. Masing-masing tahapan dibahas secara sistematis dalam sub bab ini.

#### A. Implementasi dalam Pengembangan Sosial dan Budaya

1. *Capaian Kerja*, beberapa capaian kerja yang mendukung pelaksanaan pengembangan sosial dan budaya, antara lain:
  - a. *Pemerintah RI*, menerbitkan Regulasi, berupa Inpres nomor 6/2018 tentang RAN P4GN 2018-2019; Permendagri nomor 12/2019 tentang fasilitasi pencegahan bagi instansi pemerintah; Permendesa nomor 11/2019 tentang optimalisasi Bumdes dalam P4GN;
  - b. *Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten* menerbitkan regulasi berupa Qanun, Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pencegahan Narkoba di Provinsi Aceh.
  - c. *Kementerian BUMN*, membantu pemanfaatan CSR dalam program BHUN (*BUMN Hadir untuk Negeri*) berupa beasiswa dan kunjungan wisata bagi siswa-siswi Aceh untuk menumbuhkan nasionalisme; dan pemberian bantuan sarana dan prasarana di Aceh.
  - d. *Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten*, mengembangkan budaya menanam Jagung dan diversifikasi pangan dengan

- mencanangkan menanam Jagung se-Aceh yang dimulai dengan penanaman Jagung di Bireun (di desa meunasah bungo dan kecamatan Jali, seluas 12.820 hektar), di Gayo Lues (di desa pepelah, seluas 30 hektar) dan Aceh Besar (di desa Lamteuba dan Kuta Cot Glie, seluas 30 hektar).
- e. *Kementerian Desa dan PDTT*, memberikan dukungan GDAD dengan pemanfaatan dana Bumdes bagi upaya pencegahan Narkoba dan GDAD di Aceh Besar, Bireuen dan Gayo Lues. Serta pemberian paket produksi kopi 7 (tujuh) unit di Agusen
  - f. *Kementerian Pemuda dan Olah Raga*, memberikan pelatihan kewirausahaan bagi KIPAN (Kader Inti Pemuda Anti Narkoba) di provinsi Aceh dan diikuti oleh kader pemuda dari 3 lokasi *Pilot Project*.
  - g. *Kementerian Dalam Negeri, Pemkot Banda Aceh dan BNNP Aceh (Bidang P2M)*, membentuk Desa Bersih Narkoba di desa Lam Peunereut, Aceh Besar yang bertujuan meningkatkan daya tangkal di kawasan desa dan kelurahan.
  - h. *Kementerian Luar Negeri, KBRI dan BNN*, melalui Kedubes RI untuk Austria, memfasilitasi pameran produk GDAD kopi Gayo dan Produk hasil binaan masyarakat rawan Narkoba lainnya di ruang Rotunda, Markas UNODC di Vienna pada sidang CND ke-43. Pameran ini dikunjungi delegasi sidang CND dari 172 negara yang mempromosikan Aceh, GDAD dan kopi Gayo.
  - i. *Universitas Syah Kuala dan PT Japfa Comfeed*, melalui kerjasama magang sarjana peternakan, membuka peluang wirausaha bidang peternak kan melalui magang kerja dan membuka kantor baru di seluruh Sumatera dan memilih putra Aceh sebagai pimpinan cabang PT Japfa.
  - j. *Kementerian Luar Negeri, KBRI dan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues*, melalui kunjungan Bupati Gayo H. Muhammad Amru ke, melakukan promosi investasi di Gayo dan mempromosikan kopi Gayo dan wisata sungai desa Agusen pada *Ajang Global Specialty Coffe Expo (GSCE) di Seattle, Washington* Amerika Serikat.
  - k. *Pemerintah Kabupaten, Universitas, Dunia Usaha, Ponpes dan Orsosmas dan BNN*, melakukan pengembangan

- kapasitas penggiat anti Narkoba dan tes uji Narkoba untuk menciptakan kemandirian lingkungan dalam P4GN dan deteksi dini Narkoba.
- l. BNN, BNNP dan BNNK juga melakukan bimbingan teknis ketrampilan hidup (lifeskill) kewirausahaan untuk meningkatkan produktifitas dan bernilai jual tinggi komoditi lokal.
  - m. BNN memfasilitasi Pemasaran secara online hasil karya warga binaan di kawasan rawan Narkoba di banda Aceh dan
2. *Capaian Kinerja*, beberapa manfaat program (kinerja) yang dirasakan masyarakat dalam pengembangan sosial dan budaya ini antara lain:
- a. Jajaran Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Aceh dan forkompindanya telah mengalokasikan program dan anggaran untuk melakukan kegiatan penyuluhan nati Narkoba, tes uji Narkoba, pembentukan relawan dan penggiat anti Narkoba
  - b. Kementerian BUMN memfasilitasi kegiatan belajar penanaman nasionalisme dalam BUMN Hadir untuk negeri dan memberikan sarana prasarana ibadah pada 6 kelurahan di Aceh. Selanjutnya, Forum BUMN Aceh sebanyak 47 perusahaan juga siap mendukung melalui alokasi CSR untuk kegiatan P4GN di Aceh.
  - c. Kementerian Pertanian 300 kelompok tani atau 600 petani dalam penanaman jagung di areal 30 Ha di Aceh Besar, 30 Ha di Gayo Lues dan 12.760 di Bireuen, yang direncanakan lahan Jagung akan panen 3 kali setahun dan pemasarannya dibantu PT Japfa dengan harga Rp 4.100 per kilogram dengan kadar air 17%.
  - d. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan PT Japfa mendirikan Pabrik penetasan ayam untuk membangun kewirausahaan ternak anak dengan masa panen 21 hari bagi masyarakat Lamteuba, khususnya di lokasi GDAD di Aceh Besar. Sementara kerjasama dengan Unsyiah memberikan solusi membangun kandang bagi peternakan ayam di Aceh Besar.

- e. Pengembangan kewirausahaan oleh Direktorat Pemberdayaan alternatif BNN dan Bidang P2M BNNK Gayo Lues dan Bireuen, melalui pelatihan pembuatan kue bagi wanita tani dan pembuatan kawat bronjong di 3 lokasi, meningkatkan keahlian membuat kue 60 peserta dan 200 peserta pemuda.
  - f. Bantuan beasiswa belajar di kampong Inggris oleh Dinas Pariwisata melatih 7 pemuda mahir berbahasa Inggris untuk menyongsong desa Agusen sebagai kampong Wisata.
3. *Tantangan yang dihadapi*, dalam pengembangan sosial dan budaya, antara lain:
- a. Belum banyak K/L lembaga yang terlibat dalam pengembangan sosial dan budaya di wilayah Binaan GDAD. Solusinya dengan kerangka kerja Inpres 2020-2024 tentang RAN P4GN, diharapkan peranserta aktif K/L dan dunia usaha dapat terus ditingkatkan.
  - b. Banyak materi pengembangan sosial dan budaya yang harus terus dilaksanakan dalam implementasi GDAD, seperti: sadar hukum (Kemenkum dan HAM), Deradikalisasi (Kemenag dan BNPT), Kredit usaha bagi UMKM (Kemen Koperasi dan UKM), pelatihan pentingnya *e-commerce* (kemendag dan Kominfo).
  - c. Banyak dunia usaha yang harus terus digandeng dan diajak melakukan investasi, sambil terus mempromosikan kemudahan dan jaminan investasi yang telah diberikan Pemda.
  - d. Banyak komoditi unggulan daerah yang terus dapat dikembangkan sebagai asset unggulan daerah dan penguatan kearifan local melalui bingkai wisata dan pameran keunggulan daerah dan wisata Religi.
  - e. Tantangan dari opini masyarakat yang terpengaruh manfaat legalisasi Ganja harus disikapi dengan penjelasan tentang bahayanya penyalahgunaan Ganja dan bahayanya peredaran Ganja bagi sendi-sendi kehidupan.



## **B. Implementasi dalam Peningkatan Keamanan dan Ketertiban**

### **1. *Capaian Kerja***

- a. Operasi Eradikasi Ganja di Aceh oleh BNN, BNNP, BNNK, Polri, Polda Aceh, TNI dan Kodam, dengan menysasar 24 titik lokasi eradikasi di 8 Kabupaten se-Aceh.
- b. Operasi pemberantasan Narkoba BNN, Polda Aceh dan Bea Cukai mengungkap penyelundupan Shabu di entry point, pesisir dan wilayah perbatasan. Kasus TP Narkoba yang menonjol (desember 2019) mengungkap 73,6 kg Shabu.
- c. Pengungkapan kasus TP Narkoba oleh Polda Aceh periode Januari-November 2019, sebesar: 149 kasus, 238 tersangka, 804 kg Ganja dan lahan Ganja seluas 70,5 Ha dan 81.500 pohon Ganja;
- d. Kinerja kerja pabean dan bea cukai berhasil mengungkap penyelundupan 25 kg Shabu dengan modus operandi penyelundupan barang.
- e. Pemenjaraan bandar Narkoba di Lapas/Rutan dapat mengungkap jaringan sindikat, membuat lambat laju peredaran Narkoba dan mengurangi dampak buruk Narkoba pada masyarakat;
- f. Penuntutan hukuman mati oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Aceh atas 8 (delapan) tersangka tindak pidana Narkoba;
- g. Rehabilitasi pecandu Narkoba oleh RS Umum daerah dan klinik Pratama BNNP Aceh mengurangi resiko ancaman keamanan dan ketertiban oleh aksi penyalahgunaan dan peredaran gelap para pecandu Narkoba;
- h. Capaian kerja LAPAN, melalui penginderaan jarak jauh dengan citra satelit untuk kawasan Ganja di Aceh menghasilkan hasil pemantauan satelit yang membantu pemetaan titik koordinat kawasan kultivasi Ganja.

### **2. *Capaian Kinerja***

- a. Operasi Eradikasi Ganja berhasil menyita 70,5 hektar lahan Ganja dengan potensi panen Ganja sebesar  $\pm 141.000$  Ton atau 2 ton per hektar dan menyelamatkan jutaan korban baru Narkoba;
- b. Capaian kerja penginderaan jarak jauh satelit untuk kawasan Ganja di Aceh menghasilkan hasil pemantauan

- satelit yang membantu pemetaan titik koordinat kawasan kultivasi Ganja untuk operasi eradikasi Ganja;
- c. Menghukum mati 8 (delapan) tersangka kasus Narkoba yang diharapkan mengungkap sindikat Narkoba, memutus jalur edar dan menutup entry point.
3. Tantangan yang dihadapi
- a. Kultivasi Ganja di Aceh kerap kali menysasar wilayah bekas lahan Ganja, sehingga upaya kultivasi dan eradikasi Ganja sering pada titik dan koordinat yang sama. Oleh karenanya, diperlukan penanganan terpadu bekas lahan Ganja di lokasi pegunungan yang jauh dari permukiman masyarakat.
  - b. Koordinasi dan Kolaborasi antar lembaga penegakkan hukum memerlukan komunikasi dan sinergi yang berkelanjutan untuk mengikis ego sektoral. Oleh karenanya perlu diciptakan rapat kerja, rapat koordinasi yang berkala dan berkelanjutan;
  - c. Sindikat Narkoba di Aceh memiliki jaringan dalam dan luar negeri yang mampu mengendalikan jalur perdagangan, sistem hukum, perekrutan kurir, produksi Shabu dan NPS, system cell dalam mata rantai kultivasi Ganja hingga peredaran Ganja serta sindikat Narkoba di Rutan dan Lapas. Oleh karenanya perlu terus mendidik kader-kader penegak hukum yang militant melalui pelatihan dan pendidikan khusus di dalam dan di luar negeri.
  - d. Kerjasama penegakkan hukum dengan negara Anggota ASEAN dalam mengamankan perairan di Aceh memerlukan komunikasi dan koordinasi yang intensif, mengingat maraknya jenis Narkoba berbeda antara satu negara dan negara lain, seperti: Malaysia banyak pecandu heroin dan kokain, maka Shabu akan lari ke Indonesia, sementara Ganja akan banyak dikirim ke Malaysia. Oleh karenanya forum pertemuan bilateral harus dimanfaatkan untuk membangun komitmen, diskusi, menjajagi kerjasama, membentuk satuan khusus dan terkoordinasi.

## **C. Implementasi dalam Pelestarian lingkungan hidup dan Hutan**

### **1. Capaian Kerja**

- a. Kementerian Kehutanan melalui Dinas Kehutanan dan

- perkebunan memberikan bantuan peremajaan kebun kopi di sekitar kawasan hutan, tepatnya di pintu masuk TNGL di desa Agusen.
- b. Kementerian LH dan Kehutanan memberikan ruang dan kerjasama pengelolaan hutan industry bagi masyarakat yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten setempat.
  - c. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi memberikan hutan produksi selama 35 tahun kepada masyarakat tepi hutan untuk ditanami tanaman produksi (tanaman pohon) yang masyarakat dapat mengambil keuntungan dari hasil hutan tersebut.
  - d. Kementerian LH dan Kehutanan membina lebih dari 150 kelompok dalam program perhutanan Sosial di Aceh yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan tanpa merusak hutan dan menjaga ekosistem hutan.
  - e. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dan Kuasa Pengelola Hutan (KPH) 5, melakukan penana-man kembali hutan di bantaran sungai Agusen.
  - f. Pendampingan penyuluh pertanian Kabupaten Aceh Besa dalam penanaman komoditi kunyit sebagai tumpeng sari pohon Jabon di Lamteuba, memotivasi Petani di Lamteuba menanam Jabon komoditi sekaligus melestarikan hutan.

## 2. Capaian Kinerja

- a. Masyarakat desa Agusen merasakan manfaat program peremajaan hutan dengan merawat kembali kebun kopi di bantaran sungai Agusen dengan hasil panen per minggu sebesar 4-5 kg dengan harga kopi mentah per kilo Rp 70.000.
- b. Masyarakat tepi hutan dapat menyewa hutan produksi dan mengelolanya menjadi kebun buah-buahan yang menghasilkan komoditi unggulan untuk menambah pendapatan.
- c. Masyarakat mendapat pembinaan penanaman komoditi jernang, sebuah tanaman yang memiliki harga pasar cukup mahal yang bias dikelola masyarakat dan memiliki pasar jernang yang luas.
- d. Masyarakat Lamteuba menunggu panen dari penanaman Kayo Jabon hasil program AD 2012 (sudah berusia 7 tahun)

dengan tumpangsari kunyit per pohon Jabon. Saat ini telah tertanam lebih kurang ±500 pohon di Lamteuba.

3. Tantangan yang dihadapi
  - a. Angka kerusakan hutan di Aceh cukup memprihatinkan oleh aksi illegal loggin dan perambah hutan untuk kultivasi Ganja. Oleh karenanya perlunya operasi gabungan dalam pemberantasan illegal loggin dan eradikasi Ganja.
  - b. Pembangunan jalan alternatif yang menembus jalur antar wilayah kecamatan dan antar kabupaten menjadi modus perambahan hutan yang memanfaatkan illegal loggin untuk aksi penyelundupan Ganja. Oleh karenanya dalam operasi pemetaan dan penyelidikan lahan Ganja perlu menggali informasi dan melibatkan para pelaku illegal loggin sebagai informan.
  - c. Lokasi hutan yang sulit dijangkau aparat berwajib dalam operasi eradikasi Ganja menyebabkan program reboisasi terkendala sulitnya medan dan menjadi modus kultivasi Ganja secara berulang-ulang. Oleh karenanya, perlunya menghidupkan kembali polisi hutan.
  - d. Kurangnya koordinasi antara pelaksana operasi eradikasi Ganja dan pelaksana reboisasi hutan menyebabkan hutan-hutan gundul tak mendapatkan perhatian sehingga bekas eradikasi tumbuh tanaman Ganja. Oleh karenanya, pada setiap operasi eradikasi Ganja perlunya melibatkan pihak kehutanan.

#### **D. Implementasi dalam Pengembangan Ekonomi**

1. Capaian Kerja
  - a. Sejak tahun 2010-2019, di Lamteuba dan Aceh Besar BNN telah melakukan program AD melalui kegiatan pemberdayaan alternatif, dimana masyarakat desa dimanfaatkan mantan penanam Ganja tinggal, diberikan ketrampilan kewirausahaan, mulai pembekalan komoditi unggulan (cabe, tomat, nilam, kunyit, kopi, kakao dan jabon). Beberapa komoditi itu kini telah tumbuh dan panen berkali-kali hingga hari ini.  
Selain komoditi unggulan, sejak 2012-2019 juga dilatih dan

dibekali ketrampilan non pertanian seperti: pengolahan kemiri, ketrampilan *zero waste agriculture* (ternak kambing, ayam dan ikan), ketrampilan non pertanian (service HP, pengelasan, pertukangan, pembuatan kawat bronjong dan pembuatan kue).

- b. Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Aceh dan Aceh Besar, juga telah membina kelompok tani, khususnya mantan penanam Ganja yang telah beralih menjadi petani. Pembinaan itu dengan pembekalan komoditi, pemberian bibit, saprodi, penyuluhan, pendampingan dan solusi pasca panen.
- c. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dan Kabupaten, memberikan pelatihan dan pembekalan bagaimana mengolah hasil panen, mengemas dan memasarkan dengan pendampingan akses ikut pameran produk dan pendampingan untuk mendapatkan ijin usaha.
- d. PT Japfa Comfeed, mendukung program AD dengan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar (kerjasama pembangunan pabrik penetasan ayam), Universitas Syiah Kuala (kerjasama merancang banun model kandang ayam dan kerja magang) dan Kabupaten Bireuen (menandatangani MoU dan PKS pembelian hasil panen kedelai).

Wujud nyata yang dilakukan PT Japfa Comfeed itu Nampak dengan berdirinya pabrik penetasan ayam di Seuliemeum Aceh Besar, kunjungan dan advokasi pemerintah dan petani Bireuen untuk menjual hasil panen kedelai dengan harga kompetitif, dan merancang bangun model-model kandang untuk peternakan bersama Unsyiah.

- e. PT Bintang Toejoe dengan pembinaan kewirusahaan pengembangan komoditi jahe merah telah membina 30 petani di Kutamalaka, Aceh Besar, untuk berwirausaha jahe merah dengan masa tanam 9-10 bulan dengan harga Rp 74.000 per kilo gram Jahe merah kering 15%.
- f. Kementerian PU dan PR, Dinas Bina marga provinsi dan Kabupaten, membangun akses jalan, sarana prasarana

umum dan pendukung pertanian yang memberikan dampak peningkatan ekonomi, berupa akses transportasi, produksi (pengolahan) dan pasar.

- g. Kementerian Desa dan PDTT dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, menggelontorkan dana desa dalam Bumdes untuk digunakan mendukung usaha tani dalam program AD, baik di Aceh Besar, Bireun dan Gayo Lues. Selain itu, pemberian mesin pengolahan kopi kepada kelompok tani di Agusen.
- h. Kementerian LH dan Kehutanan dan Dinas kehutan provinsi Aceh, mengeluarkan surat keputusan pemberian lahan hutan untuk produksi bagi masyarakat tepi hutan, khususnya di sekitar TNGL, Gayo Lues.
- i. TNI, Kodam dan Kodim, melakukan TMMD (TNI Manunggal Masuk Desa) dengan program membangun infrastruktur di Gayo Lues dan Mencetak sawah di Aceh Besar dan Bireun untuk membuka peluang usaha tani bagi buruh tani di wilayah tersebut.
- j. Dinas Pariwisata Pemkab Gayo Lues, yang mengalokasikan anggaran bantuan pembangunan kawasan wisata desa Agusen untuk membuka peluang usaha wisata, seperti: kios, homestay, jasa penerjemah dan navigator bagi turis asing ke TNGL).

## 2. Capaian Kinerja

- a. Melalui program pemberdayaan alternatif dari BNN, BNNP dan BNNK, yang telah memberikan peluang usaha lebih dari 652 Kepala Keluarga untuk berusaha tani dan mengembangkan kewirausahaan komoditi unggulan, dengan beberapa capaian komoditi dan jasa yang telah memberikan peningkatan pendapatan, seperti: tanaman cabe dan tomat (dua kali panen saja), nilam (tiga kali panen saja), Kopi (tetap panen hingga hari ini), Kakao (tetap panen hingga hari ini), Jabon tetap tertanam (menunggu masa ditebang), Kunyit (terus tumbuh dan panen) dan jagung (selalu panen pada musim panen hingga hari ini). Sementara untuk komoditi non pertanian, telah memberikan peluang usaha dan pendapatan berupa upah, seperti: Service HP (hanya setahun), pengolahan kemiri (hanya

- setahun digunakan), penyulihan nilam (hanya setahun bertahan), pengelasan dan pertukangan (masih berjalan), wirausaha kunyit “ASLAM” (masih bertahan hingga hari ini), peternakan kambing dana yam (hanya setahun bertahan), perikanan air tawar (hanya 4 tahun bertahan), pembuatan kue (masih bertahan hingga sekarang)
- b. Pembangunan akses jalan dan sarana prasarana memudahkan akses transportasi umum dan perbaikan pasar desa di Lamteuba memberikan peluang usaha pedagang keliling, angkutan umum dan membuka lapak-lapak dagang. Dari kondisi sepi menjadi ramai, dari efektifitas waktu yang semakin meningkat.
  - c. Program Cetak sawah dan pembangunan infrastruktur oleh TNI, membuka peluang usaha bagi buruh bangunan, buruh bangunan dan pengangguran di lokasi program untuk mendapatkan tambahan dan peningkatan pendapatan yang berkelanjutan.
  - d. Program penanaman jagung secara serentak (Aceh Besar, Bireuen dan Gayo) yang dimotori oleh Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten, membuka peluang usaha penanam jagung, pengepul, pengolah hasil panen dan pengolah produk jagung. Banyak tenaga kerja yang terlibat, peluang usaha yang diciptakan, diversifikasi pangan yang membuka penjualan kuliner baru dan muncul usaha baru pengolahan makan berbahan dasar jagung.
  - e. Peremajaan kopi oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan di Gayo Lues, bantuan bibit tanaman oleh dinas perkebunan dan kehutanan, membuka peluang usaha penanaman, perawatan, panen, pengelolaan pasca panen dan pemasaran komoditi kopi Gayo, baik kopi mentah, kopi yang di roasting, maupun wirausaha café.
  - f. Investasi PT Kopi Jenderal, memberikan peluang pemasaran kopi Gayo di wilayah Gayo Lues untuk terus menanam, memproduksi dan memasarkan kopi yang kontinyu karena jaminan pemasaran dan harga kompetitif yang ditawarkan PT Kopi Jenderal.
  - g. Investasi PT Bintang Toejoe, dalam penanaman dan wirausahaan Jahe merah di kecamatan Kuta Malaka, Aceh

- Besar, memberikan peluang usaha petani menanam, mengembangkan bibit, menjual bibit, menjual jahe merah mentah dan produk jahe merah.
- h. Bantuan CSR dari Bank Rakyat Indonesia berupa balai warga dan pendopo di lokasi tanam perdana di Gampong Meunasah Bungo, Bireuen dan desa Agusen Gayo Lues.
  - i. Bantuan CSR dari Bank Mandiri dalam pembelian produk hasil masyarakat binaan BNN di Aceh untuk dipamerkan dalam even Sidang *Expert Meeting* di Vietnam, tahun 2018.
  - j. Bantuan CSR dari Bank Syariah Aceh di Aceh Besar, memberikan kemudahan usaha tani, bantuan saprodi kawat pagar, termasuk pembinaan peningkatan hasil panen.
  - k. Bantuan CSR dari bank Indonesia cabang Aceh di Lamteuba, Aceh Besar, berupa peralatan pengolahan kunyit memberikan peluang usaha dan pendapatan wirausahawan Bapak Keucik Sulaeman yang memiliki 30 pekerja dari kalangan ibu-ibu di Lamteuba.

### 3. Tantangan yang dihadapi

- a. Meskipun pengembangan ekonomi yang masih berskala kecil, namun perubahan dan geliat ekonomi di lokasi *Pilot Project* mendapatkan simpati dan membuka peluang berusaha yang lebih besar. Oleh karenanya, semua pihak harus merawat capaian pengembangan ekonomi yang sudah ada dan berkelanjutan ini.
- b. Capaian hasil pengembangan ekonomi yang dirasakan masyarakat, jika dibandingkan dengan iming-iming menanam Ganja, tentu sangat jauh berbeda, sehingga kekhawatiran terjadinya kekambuhan menanam Ganja harus.

## E. Implementasi dalam Peningkatan Ketahanan Pangan

### 1. Capaian Kerja

- a. Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten, sebagai Badan, mengimplementasikan GDAD dalam meningkatkan ketahanan pangan, khususnya



- di lokasi *Pilot Project*. Beberapa capaian kerja yang telah dilakukan yaitu: penanaman perdana komoditi Jagung, peremajaan kopi, diversifikasi pangan dari beras ke jagung.
- b. Dinas koperasi dan UKM di provinsi dan kabupaten Bireuen memfasilitasi dan membina kewirausahaan yang dirintis oleh masyarakat, melalui pendirian dan bimbingan teknis melakukan UKM, yang memberikan peluang kerja, dan memandu UKM untuk mendapatkan izin PIRT (Perusahaan Industri Rumah Tangga).
  - c. BNN, BNNP Aceh, BNNK Biruen dan BNNK Gayo Lues, telah melaksanakan kegiatan *life skill* kewirausahaan dalam membantu petani meningkatkan pendapatan dan melakukan diversifikasi pangan, dengan menggalakkan diversifikasi makanan berbahan dasar jagung.
  - d. Kementerian LH dan Kehutanan dan dinas kehutanan dan perkebunan di provinsi Aceh memberikan bantuan bibit kopi dan pembinaan kopi sebagai komoditi unggulan.

## 2. Capaian Kinerja

- a. Masyarakat di 3 lokasi *Pilot Project* melakukan Penanaman jagung di area 12.820 hektar disamping menanam Padi.
- b. Masyarakat di Gampong Meunasah Bungo juga mendapatkan 3 kali hasil panen jagung seberat 13 ton di area 20 hektar untuk meningkatkan pendapatan dan menjadikan komoditi jagung sebagai alternatif makanan selain beras.
- c. Masyarakat petani kopi di desa Agusen telah mampu memanen kopi 70-100 kg per minggu dengan hasil bantuan program dinas perkebunan dan pertanian.
- d. Para penyuluh dan pendamping petani di lokasi *Pilot Project* mendapatkan insentif dengan ikut merawat program Alternative Development bersama petani binaan program AD.

## 3. Tantangan yang dihadapi

- a. Upaya meningkatkan ketahanan pangan di lokasi Pilot Project menghadapi tantangan, budaya bertani masyarakat

- yang masih memiliki mental pedagang, yaitu kebiasaan menjual semua hasil panen dan tidak menyisihkan sebagian untuk ditanam. Atau juga membelanjakan semua uang hasil panen untuk tujuan konsumtif dan kurang berfikir produktif.
- b. Ketahanan pangan di lokasi Gampong Meunasah Bungo, Bireuen harus menghadapi tantangan kekurangan pasokan sumber air untuk usaha taninya.
  - c. Ketahanan pangan di lokasi *Pilot Project* tepi hutan seperti di desa Agusen, menghadapi minimnya lahan untuk petani berproduksi, sehingga semangat kerja yang sudah terbangun terkendala kurangnya tersedia lahan.
  - d. Ketahanan pangan di lokasi Lamteuba, menghadapi tantangan kurang harmonisnya sektor peternakan dan pertanian, dimana setiap pemilik lahan harus memagari lahannya agar tidak dirusak hewan ternak yang berkeliaran.

## F. Implementasi dalam Pengembangan Agrowisata

1. Capaian Kerja
  - a. BNN melalui pameran di sidang CND ke-43 di Vienna Austria, memamerkan semua hasil pembinaan masyarakat *Pilot Project* GDAD, terutama produk kopi gayo dan tayangan tarian saman (desa Agusen) dan kunyit ASLAM (desa blangtingkeum, lamteuba, Aceh Besar).
  - b. Dinas Pariwisata telah mengembangkan kawasan Pilot Project untuk agrowisata, tepatnya di desa Agusen sebagai lokasi wisata alam di sungai Agusen.
  - c. Dinas pariwisata juga memprogramkan pendampingan bagi remaja untuk Pelatihan Bahasa Inggris di desa Pare, Kediri, Jawa Timur untuk mempersiapkan desa Agusen sebagai Kampung Wisata taman nasional gunung leuser.
  - d. Dinas komunikasi dan informasi di kabupaten Gayo Lues telah membuat jaringan internet untuk mempromosikan kearifan budaya lokal Gayo Lues melalui promosi wisata arung jeram, festival tari saman, negeri 1000 hafiz dan beragam rencana wisata lainnya.
  - e. Pemerintah kabupaten Gayo Lues, melalui kunjungan

kerja bupati H. Muhammad Amru, mempromosikan kopi gayo dalam festival kopi di negara bagian Oregon, Amerika Serikat. Program itu mendapatkan apresiasi yang cukup antusias dari para pengunjung pameran.

- f. Dinas Bina Marga kabupaten Gayo Lues membangun menara pandang sebagai destinasi wisata dan *design* lokasi kuliner di lokasi. Selain itu memperbaiki akses jalan ke desa Pepela yang menjadi destinasi wisata menuju air terjun di desa tersebut.

## 2. Capaian Kinerja

- a. Masyarakat desa Agusen mendapatkan peluang kerja dan pendapatan dalam upaya pemerintah mengembangkan kawasan agrowisata di lokasi. Pendapatan itu dari penyewaan perahu untuk arum jeram, jasa pelayanan *homestay*, penjualan makanan dan kuliner khas desa Agusen.
- b. Pengembangan wisata arum jeram, Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) terus gencar dilakukan oleh Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten yang menjadikan lokasi Pilot Project dikenal kalangan luas hingga ke manca negara.
- c. Masyarakat merasakan manfaat dari semua akses informasi, fasilitas pendukung wisata dan perbaikan jalan yang terus dikembangkan pemerintah di lokasi, termasuk pembukaan lokasi wisata baru, air terjun di desa Pepela, desa yang selama ini dikenal basis penanaman Ganja di Gayo Lues.

## 3. Tantangan yang dihadapi

- a. Pemerintah daerah menghadapi banyak tantangan dalam pengembangan kawasan wisata di lokasi *Pilot Project* namun belum mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.
- b. Pengembangan agrowisata merupakan strategi promosi dan pemasaran yang paling cepat bisa dilakukan dengan dukungan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.

- c. Pengembangan wisata pesisir di Aceh Besar dan Bireun merupakan tantangan dan strategi pemerintah untuk menjadikan kawasan pesisir sebagai benteng mencegah penyelundupan Narkoba.
- d. Pesona wisata di beberapa *Pilot Project* perlu menjadi perhatian kalangan akademisi, peneliti dan praktis untuk terus dieksplorasi. Beberapa fakta yang ditemukan, banyak tanaman obat dan tanaman hias yang ada di wilayah Aceh Besar namun kurang mendapatkan perhatian.

## BAB VI

### RENCANA TINDAK LANJUT GDAD 2020-2025

#### A. Mempromosikan Hidup Sehat anti Narkoba

Sesuai dengan strategi P4GN bidang Pencegahan yang dijelaskan dalam Renstra BNN 2020-2024, bahwa strategi pencegahan, yaitu: *Pertama*, Membangun sistem pencegahan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan *kedua*, Membangun kemampuan masyarakat (Individu, Kelompok) dalam menjaga dan melindungi diri, keluarga, dan lingkungan (Tempat Tinggal, Pendidikan, Kerja) dari kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Sejalan dengan arah strategi pencegahan di atas, maka tindak lanjut implementasi GDAD 2020-2025 terus diarahkan untuk membangun sistem pencegahan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Melalui implementasi dari 6 tahap GDAD, diharapkan tercipta sistem pencegahan terjadinya kultivasi Ganja dan peredaran Narkoba lainnya di Aceh.

Selanjutnya, dengan terus membangun jejaring anti Narkoba lingkungan masyarakat akan memperkuat kemampuan masyarakat (Individu, Kelompok) dalam menjaga dan melindungi diri, keluarga, dan lingkungan (Tempat Tinggal, Pendidikan, Kerja) dari kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Salah satu program kegiatan yang akan terus digiatkan pada tahun depan adalah melakukan penyuluhan, pengembangan kapasitas relawan, peggiat anti Narkoba dan agen pemulihan di masing-masing *Pilot Project*. Upaya dilakukan dengan melakukan koordinasi, sinergi, kemitraan dan pelibatan seluruh stakeholder dan komponen masyarakat.

#### B. Meningkatkan Sinergi dengan Instansi Pemerintah

Peningkatan sinergi dengan instansi pemerintah terus diperkuat dalam melakukan pembangunan yang Tematis (sesuai tupoksi masing-masing), holistik (menyeluruh dari mulai regulasi, alokasi program dan anggaran), integral (saling mengkait antar

satuan kerja pemerintah dalam Inpres P4GN) dan spasial (menca-  
kup wilayah yang menjadi fokus dalam GDAD.

Sinergi dengan pemerintah memungkinkan kepentingan instansi pemerintah dapat saling mendukung program yang diwadahi oleh Inpres. Melalui implementasi Inpres, masing-masing K/L, Pemerintah daerah dan dunia usaha dapat melakukan pengembangan potensi masyarakat di kawasan *Pilot Project* GDAD.

Salah satu bentuk konkrit dari tindak lanjut tersebut, antara lain: Kemendagri membentuk Desa Bersih Narkoba, Bakamla membentuk Desa Maritim, Kementan meningkatkan ketahanan pangan dan diversifikasi pangan; Kemenpora membentuk kader inti pemuda anti Narkoba; Kemendesa dan PDTT melakukan pendampingan Bumdes, Polri membina Babinkamitbmas dan TNI membina Babinsa.

### **C. Meningkatkan Kemitraan dengan Dunia Usaha**

Pada bulan Oktober 2018 PT Bintang Toejoe telah memulai menjalin kemitraan dengan BNN dan BNNP Aceh serta Dinas Pertanian Provinsi Aceh dan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, dalam pengembangan kewirausahaan komoditi jahe merah. Upaya ini menjadi perintis keikutsertaan dunia usaha lainnya, seperti PT Japfa untuk ikut bermitra mendukung GDAD.

Selanjutnya, pada bulan November 2019, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk telah memulai menjalin kemitraan dengan pemerintah Kabupaten Bireuen dan BNNP Aceh dalam mengembangkan komoditi jagung di Bireun. PT Japfa juga membangun kerjasama dan kemitraan dengan pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Universitas Syiah Kuala dalam melakukan terobosan teknologi pembuatan kandang ayam dan pabrik penetasan ayam.

Upaya ini akan terus ditindaklanjuti dalam implementasi GDAD 2020-2025 untuk mengajak lebih banyak dunia usaha dalam kesempatan membangun jejaring kerja dengan pemerintah daerah dalam kerangka pembangunan berkelanjutan GDAD. Kemitraan ini tentunya menguntungkan kedua belah pihak, dimana dunia usaha diberikan peluang berusaha dan

mengembangkan bisnisnya dengan tersedianya lahan yang luas di Aceh, akses perijinan yang mulai dimudahkan oleh pemerintah daerah, tersedianya bahan baku dan tenaga kerja yang memadai.

#### **D. Meningkatkan peran serta Akademisi dan Praktisi**

Peran akademisi dan praktisi sangat diperlukan bagi pengembangan GDAD. Salah satu peran penting yang terus diharapkan adalah hasil-hasil kajian dan riset untuk implementasi GDAD yang bertujuan mengembangkan potensi sosial dan budaya, potensi sumber daya mineral dan sumber daya alam lainnya.

Perguruan tinggi memiliki peran yang strategis dalam menjembatani program-program pemerintah untuk diterima di masyarakat, melalui riset, pendampingan, kuliah kerja lapangan dan kuliah kerja nyata yang memungkinkan tereksplorasinya potensi hasil-hasil kajian dan riset yang berdampak memberikan kemudahan investasi para investor.

Salah satu contoh konkrit yang dapat terus ditindak lanjuti dalam implementasi GDAD di masa yang akan datang adalah pendampingan mahasiswa dalam mendukung gerakan masyarakat sehat (Germas), gerakan membangun Genre (Generasi Terencana), mengembangkan desa mandiri, desa maritim, desa melek internet dan lainnya.

#### **E. Meningkatkan Pelibatan organisasi masyarakat**

Organisasi kemasyarakatan merupakan kunci penting dalam membangun modal sosial di masyarakat. Salah satu keberhasilan program pembangunan adalah tersedianya modal sosial yang memungkinkan masyarakat dapat saling membangun kepercayaan dalam pembangunan.

Peran organisasi sosial masyarakat (orsosmas), seperti: partai politik, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, organisasi kewanitaan, organisasi profesi, komunitas, dan lainnya), tidak hanya dapat memobilisasi massa untuk mendukung pelaksanaan GDAD, tetapi juga merawat, memonitor dan memberikan umpan balik bagi perbaikan kualitas program P4GN di masa depan yang lebih baik.

Salah satu tindak lanjut yang akan terus digalakkan dalam implementasi GDAD 2020-2025 adalah pembentukan relawan, kegiatan anti Narkoba, agen pemulihan dan agen anti Narkoba di semua lingkungan. Diharapkan dengan dukungan moril dan materiil orsosmas dalam implementasi GDAD akan semakin meningkatkan capaian kerja dan kinerjanya.

#### **F. Meningkatkan kerjasama bilateral dan multilateral**

Dari semua tindak lanjut yang telah diuraikan di atas, diperlukan langkah-langkah melakukan kerjasama dan kolaborasi dalam sinergi, kemitraan, peran serta aktif dan pelibatan untuk mencapai kinerja dalam implementasi GDAD yang lebih baik.

Peningkatan kerjasama bilateral akan menjadi tindak lanjut Pemerintah, khususnya kerjasama bilateral dengan pemerintahan Thailand yang telah dijajagi dalam even kerjasama bilateral kedua negara, termasuk asistensi *Doi Tung Development Project (DTDP)* dalam implementasi GDAD di Aceh.

Peningkatan kerjasama multilateral juga terus dibangun untuk memberikan pemahaman kepada dunia bahwa Indonesia masih berkomitmen dalam mengawal dan menjalankan *single convention* 1961, dimana salah satu isinya melarang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (Ganja).

Melalui tindak lanjut implementasi GDAD 2020, BNN menghadirkan delegasi Indonesia dalam Sidang *CND meeting* ke-44 di Vienna pada Maret 2020; Sidang *ASEAN Member Meeting on Drugs Matter* di Brunei pada Juli 2020; Sidang *ASOD meeting* di Bali pada Agustus 2020, Sidang *Expert Meeting Group* pada Desember 2020 di Vienna.



## **BAB VII PENUTUP**

Demikian petunjuk teknis implementasi GDAD 2016-2025 ini disusun untuk memberikan pemahaman tentang program AD, GDAD, capaian kerja (proses kegiatan) dan capaian kinerja (hasil yang dirasakan masyarakat) dalam trust building (2016-2018), capaian implementasi GDAD 2019 dan tindak lanjut GDAD tahun 2020-2025.

Dengan adanya buku petunjuk teknis ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran K/L, Dunia Usaha, Pemerintah Daerah, Akademisi, Praktisi dan Orsosmas, untuk terus bersinergi dan bermitra dengan membantu implementasi GDAD hingga tahun 2025.

**NARKOBA NO, SEHAT YES, PRESTASI YES**

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri. 2011. *Community Development Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Andini, Khrisna (ed). 2014. *Pengembangan masyarakat Community Development*. Surakarta: UNS Press
- Anwar, Oos. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di era Global*. Bandung: Alfabeta
- Adi, Rukhminto Isbandi. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemebrdayaan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa
- Adisasmita. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Jakarta: Graha Ilmu
- Astawa, I Gde Pantja. 2019. *Pemberdayaan Desa dalam system pemerintahan Daerah*. Bandung: Pustaka Setia
- BNN. 2019. *Petunjuk Teknis Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan Narkoba*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Alternatif.
- BNN. 2019. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewirausahaan pada Kawasan Rawan Narkoba*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Alternatif.
- BNN. 2019. *Paparan Hasil Survey Nasional Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, di BNN tanggal 26 November 2019*.
- BNN. 2019. *Paparan Sinerji Program AD dalam pengentasan Ganja, POlda Aceh, pada Rakornas Pengentasan Ganja di Jakarta 2 November 2019*
- BNN. 2016. *Indonesia Darurat Narkoba*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Alternatif.
- BNN. 2017. *Grand Design Alternative Development (20162025)*. Jakarta : Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN
- BNN. 2017. *Survey Nasional Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba dilingkungan Pelajar dan Mahasiswa Tahun Anggaran 2016*. Jakarta : Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN
- BNN. 2017. *Press Release Akhir Tahun 2016*. Jakarta : Humas BNN

- BNN. 2013. *Cetak Biru Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Roren
- BNN. 2015. *Pemetaan Kawasan Rawan Narkoba*. Jakarta : RorenBNN
- BPS. 2019. *Statistik Indonesia*. Jakarta: BPS Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Damsar & Indrayani. 2016. *Pengantar Sosiologi Perdesaan*. Jakarta: Kencana
- Daniel & Darmawati. 2008. *Participatory Rural Appraisal*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Ife dan Tosiriero. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Indrajit & Soimin. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan*. Jakarta: Intrans Publishing
- Hasyim dan remiswal. 2009. *Community Development berbasis ekosistem*. Jakarta: Diadit Media
- Mardikanto, Totok. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Nawawi, Ismail. 2019. *Pembangunan dan Problema Masyarakat*. Surabaya : Putra Media Nusantara
- Nasdian, Fredian Tonny. 2014. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Nugroho D., Riant. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta : Elex Media Computindo
- Rahardjo. 2010. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Soeharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : Aditama
- Sobirin & Haryanto. 2009. *Memantau Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: LSPP
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Anti Teisnya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

- Soleh, Chabib. 2014. *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*. Bandung : Fokusmedia
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2017. *Kemitraan dan Model model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media
- Theresia, Aprilia (ed). 2014. *Pembangunan berbasis masyarakat*. Bandung : Alfabeta
- Theresia, Aprilia (ed). 2014. *Pengembangan Masyarakat Community Development*. Surakarta: UNS Press
- Widiastuti & Sa'adah dkk. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Marginal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Untung, Budi. 2014. *CSR dalam dunia bisnis*. Yogyakarta: ANDI

## **DAERAH RAWAN KULTIVASI GANJA DI PROVINSI ACEH**

### **ACEH BESAR**

1. Cot Sibate, Montasik, Aceh Besar
2. Mesalee, Indrapuri, Aceh Besar
3. Lam Aling, Kuta Cot Glee, Aceh Besar
4. Samahani, Kuta Malaka, Aceh Besar
5. Lamteuba Droë, Seulimeum, Aceh Besar.
6. Desa Piyeung, Montasik, Aceh Besar,
7. Desa Pulo, Seulimeum, Aceh Besar
8. Gampong Pulo, Seulimeum, Aceh Besar

### **PIDIE**

9. Ingin Jaya, Muara Tiga, Pidie
10. Tunong, Keumala, Pidie
11. Krueng Seukuek, Tangse, Pidie

### **ACEH SELATAN**

12. Pegunungan Sawah Tingkem, Bakongan Timur, Aceh Selatan
13. Pegunungan Seleulat, Bakongan Timur, Aceh Selatan

### **BIREUEN**

14. Blang Poroh, Jeunib, Bireuen
15. Lheue Barat, Jeunib, Bireuen
16. Lheue Simpang, Jeunib, Bireuen
17. Desa Tanjung Beridi, Peusangan Selatan, Bireuen
18. Desa Darussalam, Peusangan Selatan, Bireuen
19. Desa Pulo Harapan, Peusangan Selatan, Bireuen
20. Desa Pulo Lawang, Peudada, Bireuen
21. Desa Sawang, Peudada, Bireuen
22. Desa Blang Kubu, Peudada, Bireuen
23. Desa Matang Pasi, Peudada, Bireuen
24. Desa Buket Paya, Peudada, Bireuen
25. Desa Jangka Keutapang, Jangka, Bireuen

26. Desa Jangka Mesjid, Jangka, Bireuen
27. Desa Pante Paku, Jangka, Bireuen
28. Desa Alue Buya Pasi, Jangka, Bireuen
29. Desa Kuala Cerape, Jangka, Bireuen
30. Desa Lhok, Kulam, Plimbang
31. Desa Bale, Daka, Plimbang
32. Desa Blang, Samagadeng, Pandrah

### **ACEH UTARA**

33. Tanah Luas, Plu Pakam, Aceh Utara
34. Batee Ulee, Cot Girek, Aceh Utara.
35. Lubuk Tilam, Cot Girek, Aceh Utara
36. Desa Teupin Reuseb, Sawang, Aceh Utara,
37. Desa Lancok, Sawang, Aceh Utara

### **NAGAN RAYA**

38. Rambong, Beutung, Nagan raya
39. Bumi Sari, Beutung, Nagan raya
40. Pante Ara, Beutung, Nagan raya

### **ACEH TENGAH**

41. Tanoh Depet, Celala, Aceh Tengah
42. Dedamar, Bintang, Aceh Tengah
43. Kuala I, Bintang, Aceh Tengah.

### **GAYO LUES**

44. Pinang Rugup, Rikit Gaib, Gayo Lues.
45. Pepelah, Pining, Gayo Lues
46. Kendawi Dabun, Gelang, Gayo Lues
47. Agusen, Blangkejeren, Gayo Lues

### **ACEH TENGGARA**

48. Jambur Lakkak, Ketambe, Aceh Tenggara
49. Bintang Bener, Ketambe, Aceh Tenggara
50. Suka Rimbun, Ketambe, Aceh Tenggara